



KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

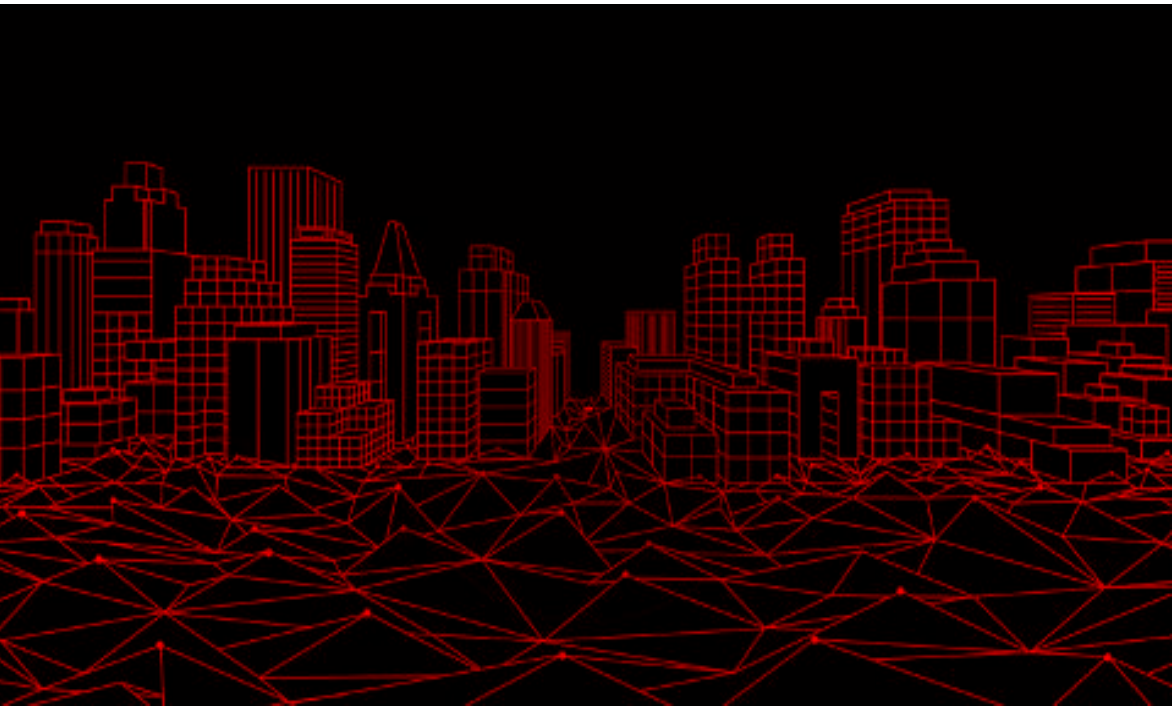


**MEMPERKUAT MODEL PERTUMBUHAN,
MEMPERTAJAM STRATEGI KEBIJAKAN
GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA
MAJU DAN INKLUSIF**



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

**MEMPERKUAT MODEL PERTUMBUHAN,
MEMPERTAJAM STRATEGI KEBIJAKAN
GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA
MAJU DAN INKLUSIF**



MEMPERKUAT MODEL PERTUMBUHAN, MEMPERTAJAM STRATEGI KEBIJAKAN GUNA MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU DAN INKLUSIF

KAJIAN KEBIJAKAN PUBLIK

- PELINDUNG** : Ketua Umum Pengurus Pusat ISEI, Perry Warjiyo
- PEMIMPIN REDAKSI** : Ketua Bidang II, Dody B. Waluyo
- DEWAN EDITORIAL** : Suahasil Nazara, Iskandar Simorangkir, Riswinandi, Gatot Trihargo, Lana Soelistianingsih, Aida S. Budiman, Solikin M. Juhro, Prayanto, Achmad Zaky
- EDITOR PELAKSANA** : Firman Mochtar, Telisa A. Faliyanti, Sahminan, Juli Budi Winantya, Tarsidin
- KONTRIBUTOR** : Destry Damayanti, Tirta Segara, M. Anwar Bashori, Murniati Mukhlisin, Bustanul Arifin, Nimmi Zulbainarni, Ninasapti, Rizki Handayani, Ahmad Erani Yustika, Yuana Sutyowati, Yunita R. Sari, M. Rudy Salahuddin, Handito Joewono, Bayu Krisnamurthi

Kajian Kebijakan Publik adalah kajian yang dipublikasikan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang merangkum berbagai perspektif pemikiran, analisis, dan rekomendasi kebijakan ekonomi publik, mencakup kebijakan-kebijakan di sisi permintaan, sisi penawaran atau sektoral, reformasi struktural, serta strategi kebijakan dalam menavigasi perkembangan perekonomian di era digital.

PENERBIT

Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

REDAKSI

Jl. Daksa IV/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

Telp : +62-21-7222463, Fax. +62-21-7201812

Email : isei.pusat@gmail.com

Website : www.isei.or.id

ISBN 978-602-14722-7-9

Cetakan Pertama, Maret 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun

SAMBUTAN

Perekonomian global yang penuh ketidakpastian perlu disikapi dengan antisipasi dan kesiapan kebijakan yang kuat sehingga perekonomian domestik tetap berdaya tahan dan terus bertumbuh. Kesiapan ini satu sisi terkait dengan kemampuan perekonomian untuk mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Pada sisi lain, kesiapan juga berkaitan dengan kemampuan menyusun strategi serta kehandalan menjabarkan dan mengeksekusi kebijakan yang telah ditetapkan. Berbagai elemen kesiapan tersebut pada gilirannya akan mendukung keberhasilan membangun perekonomian Indonesia yang kuat dan berkesinambungan.

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berkeinginan keras untuk berperan aktif dalam memperkuat ketahanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi. *Paper* ini merupakan salah satu perwujudan sumbang saran ISEI untuk berkontribusi nyata mendukung arah kebijakan ke depan. *Paper* kami beri judul “Memperkuat Model Pertumbuhan, Mempertajam Strategi Kebijakan Guna Mewujudkan Indonesia Maju dan Inklusif,” yang merupakan kompilasi pemikiran para ekonom Indonesia yang disampaikan pada Sidang Pleno ISEI XX dan Seminar Nasional 2019 yang berlangsung di Bali pada tanggal 27-29 Agustus 2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dan membantu penulisan *white paper* ini.

Secara umum usulan ISEI dalam *paper* ini memperkuat fokus kebijakan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. *Paper* mengusulkan tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya memperkuat model pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas faktor produksi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta penguatan kelembagaan. Kebijakan kemudian dijabarkan pula dengan mempertajam strategi kebijakan meliputi lima kebijakan penting, yakni: (i) pengelolaan kebijakan makroekonomi yang disiplin dan sehat, (ii) kebijakan sektor unggulan, (iii) kebijakan untuk memperkuat UMKM, (iv) kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah, dan (v) memperkuat sumber pembiayaan guna menopang berbagai kebijakan yang akan ditempuh.

Sebagai penutup, kami berharap *paper* ini bisa menjadi referensi bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Kami meyakini sinergi yang kuat baik antar kebijakan, antar pemerintah pusat dan daerah, dan antar pelaku ekonomi publik dan swasta, akan menjadi kunci bangsa ini untuk menjadi bangsa yang besar, yang maju dan inklusif. ISEI sebagai organisasi profesi akan berpartisipasi aktif mendukung pencapaian tujuan akhir tersebut.

Jakarta, Maret 2020
Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Perry Warjiyo, S.E., MA., Ph.D.
Ketua Umum

PENGANTAR EDITORIAL

Membaca peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju dan inklusif tentunya tidak akan cukup hanya mengandalkan prakiraan pertumbuhan yang tetap moderat dalam jangka panjang. Apalagi, ditengah dinamika global yang masih kurang menguntungkan serta belum menunjukkan dukungan yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, menandakan kebutuhan Indonesia untuk secara segera menempuh langkah-langkah yang diperlukan dalam memperkuat reformasi struktural dan peningkatan daya saing. Dalam hal ini, rumusan kebijakan yang menyasar pada pertumbuhan yang berkualitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa jalannya transformasi ekonomi tidak hanya memperhatikan angka pencapaian pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga harus merata dalam mensejahterakan masyarakat.

Berangkat dari pemikiran tersebut maka diperlukan adanya suatu analisa kebijakan yang membantu pemecahan persoalan secara linear dan komprehensif, termasuk didalamnya memberikan respons yang cukup memadai mewakili lintas sektor. Sebagai suatu organisasi profesi, bidang II Pengurus Pusat ISEI yang merupakan bidang Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan melihat ini sebagai suatu diskursus yang berharga untuk terlibat di dalamnya. Hal ini bukan berarti tanpa alasan, terutama ketika melihat risiko segmentasi kebijakan yang parsial bisa menimbulkan sekat baru dalam upaya pembangunan nasional.

Melalui dukungan dari 14 Sub Bidang Perumusan dan Rekomendasi Kebijakan yang mewakili sektor ekonomi keuangan serta sektor strategis lainnya, kami menghadirkan perspektif pemikiran ISEI dalam bentuk *paper* berjudul “Kajian Kebijakan Publik”. Kelebihan dari *Paper* Kajian Kebijakan Publik yang ada dihadapan pembaca kali ini adalah mencoba melihat kompleksitas perekonomian dan memberi sumbangsih pemikiran dalam kacamata independensi kelembagaan dengan latar belakang keanggotaan yang beragam, mewakili akademisi, pelaku usaha dan otoritas di pemerintahan.

Paper ini sendiri akan menjadi publikasi rutin yang disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di dalam negeri. Kami tentunya menaruh harapan besar bahwa dalam setiap wacana yang disampaikan tidak hanya berhenti diatas meja diskusi, tetapi juga bisa memberikan perspektif baru bagi implementasi kebijakan.

Selamat membaca.

Jakarta, Maret 2020
Pengurus Pusat
Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia

Dody Budi Waluyo, S.E., MBA.
Ketua Bidang II
Perumusan & Rekomendasi Kebijakan

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ketahanan ekonomi Indonesia terus membaik. Di tengah kondisi perekonomian global yang kurang kondusif, pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan ditopang stabilitas ekonomi yang terjaga. Indikator kesejahteraan seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan juga menurun. Perkembangan positif tersebut tidak terlepas dari pengelolaan makroekonomi yang disiplin serta penguatan struktur ekonomi yang terus ditempuh secara konsisten.

Ke depan, tantangan perekonomian tetap tidak ringan. Tantangan yang perlu mendapat perhatian ialah pesatnya peningkatan peran teknologi digital dalam perekonomian global, termasuk di Indonesia. Perkembangan ini perlu dicermati karena selain dapat berdampak positif dalam meningkatkan kenaikan efisiensi dan produktivitas perekonomian, teknologi digital juga dapat membawa disrupsi dalam perekonomian apabila tidak dikelola dengan baik.

Perkembangan teknologi digital makin menambah tantangan bagi perekonomian yang bersumber dari global dan domestik. Dari global, tantangan bersumber dari produktivitas yang menurun, kebijakan inward looking yang meluas, dan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Sementara tantangan dari domestik berhubungan dengan kinerja sektor industri pengolahan yang belum kuat, daya dukung infrastruktur yang masih terbatas, sumber pembiayaan domestik yang belum optimal, serta kualitas sumber daya manusia yang perlu terus dikembangkan.

Berbagai tantangan tersebut perlu direspons dengan tepat sehingga tetap dapat membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan inklusif. Indonesia yang maju dan inklusif bermakna bahwa perekonomian Indonesia didukung stabilitas yang terjaga, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, ketahanan eksternal yang kuat, dan kesejahteraan yang meningkat. Stabilitas perekonomian, baik stabilitas harga maupun stabilitas sistem keuangan, yang terjaga menjadi basis pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ketahanan eksternal yang kuat tercermin pada neraca pembayaran surplus serta struktur pembiayaan luar negeri yang sehat, diperlukan untuk memitigasi risiko ketidakpastian global. Sementara itu, kesejahteraan masyarakat berupa angka pengangguran dan kemiskinan yang turun, serta ketimpangan antar kelompok pendapatan masyarakat dan antar wilayah di Indonesia yang mengecil, diperlukan agar hasil pembangunan dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Respons kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi tersebut ialah dengan memperkuat model pertumbuhan ekonomi, sebagai modal dasar pembangunan ekonomi ke depan. Model pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya diarahkan untuk memperkuat faktor produksi seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbanyak peran infrastruktur, serta memperluas penguasaan teknologi digital dan inovasi. Model pertumbuhan tersebut juga didukung oleh penguatan kelembagaan serta peningkatan ketahanan pangan dan energi sebagai elemen pendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

Dari faktor produksi tersebut, pengembangan SDM menjadi kunci untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi digital yang pesat yang telah mengubah lanskap ekonomi dan keuangan digital. Pengembangan SDM tidak hanya terkait dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan teknologi digital, tetapi juga dikembangkan secara sistematis dan terarah untuk mendukung peningkatan inovasi dan kreativitas perekonomian sebagai basis untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Dalam kaitan ini, ISEI mendukung penuh fokus kebijakan Pemerintah ke depan untuk membangun program-program pendidikan yang dapat menjadikan SDM Indonesia menjadi unggul dalam menjawab tantangan.

Fokus kebijakan lain dari model pertumbuhan ekonomi ialah penguatan kelembagaan. Kelembagaan terkait dengan berbagai upaya menciptakan tata kelola yang baik dan bersih serta berbagai langkah untuk memperbaiki iklim usaha. Upaya memperbaiki iklim usaha dapat ditopang oleh proses deregulasi dan debirokratisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saingberusaha. Berbagai kebijakan untuk meningkatkan tingkat kemudahan berusaha di Indonesia perlu terus ditempuh sehingga mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Respons untuk memperkuat model pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung penajaman strategi kebijakan di lima area strategis. Strategi pertama terkait dengan pengelolaan kebijakan makroekonomi yang disiplin dan sehat, sebagai elemen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Strategi selanjutnya berhubungan dengan kebijakan di sektor unggulan, kebijakan memperkuat UMKM, kebijakan meningkatkan potensi sistem ekonomi syariah, serta kebijakan untuk memperkuat sumber pembiayaan.

Penajaman strategi kebijakan di sektor unggulan perlu ditempuh karena mempertimbangkan dampaknya yang besar dan hasilnya yang lebih cepat bagi perekonomian. Identifikasi menunjukkan sektor unggulan yang dapat menjadi prioritas ialah sektor industri pengolahan, sektor pariwisata, sektor maritim, dan industri kreatif. Penajaman strategi di sektor unggulan ini dapat dilakukan melalui implementasi end to end dan quick win strategy kepada produk yang dipandang memiliki keunggulan kompetitif.

Kebijakan untuk memperkuat peran UMKM dalam perekonomian juga ditempuh secara simultan. Penguatan peran UMKM sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, yang tidak hanya untuk memastikan keikutsertaan berbagai kelompok pendapatan baik UMKM dan non-UMKM dalam berusaha, tetapi juga dapat diperluas untuk memperkuat hubungan usaha antar sektor (forward dan backward linkage) serta hubungan kegiatan ekonomi antar kawasan di Indonesia.

Terakhir, strategi untuk memperkuat sumber pembiayaan juga perlu terus ditempuh karena akan memengaruhi kemandirian ekonomi Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penguatan sumber pembiayaan dapat dilakukan melalui berbagai langkah pendalaman pasar keuangan, dengan memperbanyak jenis dan jumlah instrumen. Pendalaman pasar keuangan ini juga termasuk dengan mengoptimalkan potensi dari ekonomi

dan keuangan syariah yang diyakini akan makin memperkuat ketahanan ekonomi. Berbagai strategi kebijakan pada akhirnya perlu tetap dipadupadankan sehingga menjadi satu bauran kebijakan yang terintegrasi secara optimal. Bauran kebijakan meliputi bauran kebijakan intra-sektor, kebijakan antar sektor, serta kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain bahwa sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan perlu terus diperkuat sehingga berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan harmonis menuju tujuan menjadikan Indonesia yang maju dan inklusif.

DAFTAR ISI

Kata Sambutan	3
Pengantar Editorial	4
Ringkasan Eksekutif	5
1. Pendahuluan	10
2. Tantangan Perekonomian Global	12
2.1. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Global Melambat	12
2.2. Kebijakan 'Inward Looking' Meluas, Volume Perdagangan Dunia Menurun	14
2.3. Perkembangan Teknologi Digital dan Revolusi Industri 4.0	14
2.4. Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Dapat Meningkatkan	15
3. Tantangan Perekonomian Domestik	16
3.1. Peran Komoditas yang Tetap Besar dan Kinerja Industri Pengolahan yang Menurun	16
3.2. Kemampuan Pembiayaan Pembangunan yang Belum Optimal	17
3.3. Iklim Berusaha dan Daya Dukung Infrastruktur Perlu Terus Ditingkatkan	19
3.4. Kualitas SDM Perlu Terus Didorong	20
4. Prospek Perekonomian Indonesia	21
4.1. Prospek Perekonomian Jangka Pendek	21
4.2. Prospek Jangka Menengah-Panjang	22
5. Sasaran Akhir dan Penguatan Model Pertumbuhan Ekonomi	25
5.1. Memperkuat Peran Faktor Produksi	25
5.1.1. Kualitas SDM dan Tenaga Kerja	25
5.1.2. Pembangunan Infrastruktur	27
5.2. Memperkuat Peran Teknologi Digital dan Mempertajam Inovasi	28
5.2.1. Penguatan Peran Teknologi Digital	28
5.2.2. Penajaman Inovasi	29
5.3. Memperbaiki Kelembagaan dan Iklim Usaha	30
6. Penajaman Strategi Kebijakan	32
6.1. Mempertahankan Kebijakan Makroekonomi yang Disiplin dan Berhati-hati	32
6.2. Memperkuat Kebijakan Sektoral	32
6.2.1. Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi	32
6.2.2. Memperkuat Sektor Unggulan	37
6.2.2.1. Sektor Industri Pengolahan	37
6.2.2.2. Sektor Pariwisata	39
6.2.2.3. Sektor Maritim	40
6.2.2.4. Industri Kreatif	42
6.3. Memperkuat Peran UMKM	45
6.4. Memperluas Pemberdayaan Ekonomi Syariah	46

6.5. Meningkatkan Sumber Pembiayaan	48
6.5.1. Penerbitan Obligasi Daerah	48
6.5.2. Pengayaan Instrumen untuk Menangkap Potensi Dana Tax Amnesty	50
6.5.3. Penguatan Peran Lembaga Pembiayaan dan Sektor Keuangan	52
6.5.4. Penguatan Peran Pembiayaan UMKM	53
7. Penutup	55
Referensi	56
Lampiran	57

1. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dalam lima tahun terakhir secara bertahap berada dalam tren meningkat. Setelah sempat melemah pada 2015, pertumbuhan ekonomi kembali meningkat hingga pada 2018 mencapai 5,17%. Penguatan pertumbuhan ekonomi disertai inflasi yang menurun, dari sebesar 8,36% pada akhir 2014 menjadi sebesar 3,14% pada akhir 2018. Sementara itu, ketahanan sektor eksternal dapat terus dijaga, antara lain ditandai dengan defisit neraca transaksi berjalan yang bisa dipertahankan di bawah 3% PDB dan cadangan devisa yang meningkat yang hingga saat ini berada di kisaran USD 123 miliar. Perkembangan terkini juga menunjukkan pertumbuhan ekonomi tetap baik di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Perkembangan positif perekonomian juga ditopang oleh membaiknya berbagai indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan terus menurun, dari sekitar 11% pada 2014 menjadi 9,7% pada 2018. Demikian pula halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, yang jika pada 2014 berkisar 5,9%, saat ini pada 2019 sekitar 5%. Ketimpangan pendapatan masyarakat pun menurun, ditandai dengan Gini ratio yang berkurang, dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,384 pada 2018.

Perekonomian yang membaik tentu tidak terlepas dari dampak positif pengelolaan makroekonomi yang disiplin dan sehat serta berorientasi ke depan. Kebijakan fiskal terlihat solid, ditandai dengan defisit APBN yang sehat dan berkelanjutan serta belanja yang lebih terarah. Respons ini kemudian berkontribusi pada utang pemerintah yang tetap pada level sehat. Kebijakan moneter juga konsisten ditempuh dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga inflasi terus menurun dan nilai tukar yang terjaga. Sementara itu, kebijakan struktural terus diperkuat guna memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan efisiensi perekonomian. Dalam kaitan ini, beberapa paket kebijakan ekonomi telah dikeluarkan oleh Pemerintah sehingga menjadi bagian dari reformasi struktural. Hal tersebut ditunjang pula pembangunan infrastruktur dalam skala yang cukup besar.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia tetap menjanjikan. Pada tahun 2030, Indonesia diperkirakan akan menempati peringkat ke-4 dunia berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto *Purchasing Power Parity* (PDB PPP). Kondisi tersebut membaik bila dibandingkan dengan kondisi Indonesia saat ini yang menempati peringkat ke-16 dunia berdasarkan PDB nominal dan peringkat ke-7 dunia berdasarkan PDB PPP. Prakiraan tersebut didasarkan pada penilaian bahwa pangsa PDB suatu negara terhadap PDB dunia pada akhirnya akan konvergen dengan pangsa penduduk negara tersebut mengingat adanya konvergensi PDB per kapita antara negara maju dan negara berkembang.

Pencapaian prospek tersebut tentu tidak mudah mempertimbangkan berbagai tantangan ke depan yang dapat mengemuka. Tantangan bersumber dari global dan domestik dengan dimensi jangka pendek yang bersifat siklikal dan jangka menengah yang bersifat struktural. Dalam jangka pendek, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada ketidakpastian global yang masih tinggi, antara lain dipicu eskalasi ketegangan hubungan perdagangan yang berlanjut. Dalam jangka menengah, beberapa tantangan

global dan domestik perlu dicermati karena dapat mempengaruhi upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di era digital. Era digital perlu mendapat penekanan karena di satu sisi meningkatkan efisiensi perekonomian, namun di sisi lain dapat memberikan disrupsi bagi perekonomian bila tidak dikelola dengan baik.

Paper ini menyampaikan proposal ISEI tentang strategi kebijakan ekonomi dalam memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di era digital. Paper akan terdiri dari tujuh bagian. Bagian kedua mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi global yang perlu diantisipasi bersama. Bagian ketiga memaparkan tantangan struktural domestik yang masih dan akan dihadapi perekonomian Indonesia. Bagian keempat tentang prospek perekonomian Indonesia ke depan dan faktor yang mempengaruhi. Bagian kelima mengenai sasaran pembangunan ekonomi dan modal dasar pembangunan. Bagian keenam tentang strategi pembangunan dan ditutup di bagian tujuh. Secara garis besar, uraian dalam paper ini dapat digambarkan dalam Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Skema Menuju Indonesia Maju dan Inklusif

2. TANTANGAN PEREKONOMIAN GLOBAL

Tantangan perekonomian ke depan tidak terlepas dari transisi perubahan struktural perekonomian global. Perubahan struktural tidak hanya terjadi dalam ruang lingkup regional, namun sudah melebar menjadi fenomena yang mendunia. Perubahan struktural tidak hanya berkaitan dengan perkembangan di pasar barang, tetapi juga meluas kepada pasar lain seperti pasar uang, dan bahkan berpotensi membentuk pasar lain yang baru.

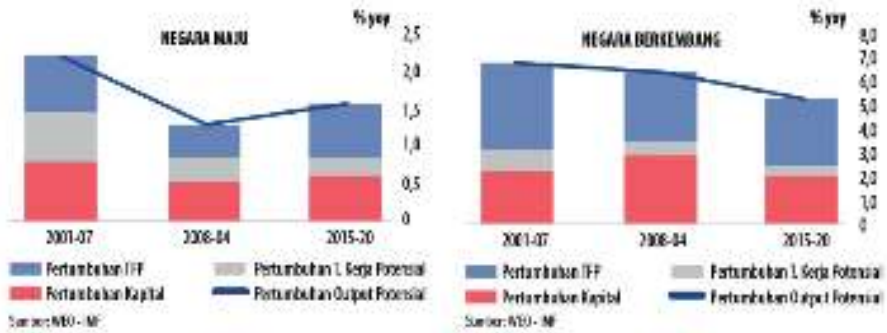
Perubahan struktural global dimulai dari menurunnya pertumbuhan potensial ekonomi dunia. Risiko ini dipengaruhi menurunnya produktivitas ekonomi dunia sejalan dengan kondisi ekonomi yang menua (*aging population*) dan respons kebijakan proteksionisme banyak negara (*inward looking policy*). Risiko ini bila terus berlanjut dapat menurunkan volume perdagangan dunia dan harga komoditas dunia serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Selain terkait pertumbuhan ekonomi potensial dunia dan perubahan struktural ekonomi dunia, juga terkait dengan peran pesat teknologi digital dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini tentu akan mengubah banyak perilaku kegiatan ekonomi, yang bila berlanjut dapat berdampak kurang menguntungkan bagi kesinambungan pertumbuhan ekonomi dunia.

2.1. Pertumbuhan Ekonomi Potensial Global Melambat

Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial global secara umum telah terindikasi sejak awal dekade 2000.¹ IMF (2015a) menunjukkan pertumbuhan potensial makin melambat pasca krisis keuangan global 2008. Perlambatan sejak awal 2000 terutama terjadi pada negara maju sedangkan pertumbuhan output potensial negara berkembang masih mencatat kenaikan didorong langkah transformasi struktural yang ditempuh di banyak negara Asia (Grafik 1). Namun demikian, setelah era krisis keuangan global, pertumbuhan ekonomi potensial negara berkembang juga menurun sehingga menjadi sejalan dengan perkembangan di negara maju.

IMF (2015a) berargumen perlambatan pertumbuhan potensial dipengaruhi penurunan produktivitas (*Total Factor Productivity*). Investasi dunia yang menurun serta inovasi belum meningkat kembali menjadi penyebab kondisi ini. Kondisi terkini menunjukkan bahwa produktivitas perekonomian dunia telah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis keuangan global tahun 2008 – 2009. Di negara maju, pertumbuhan PDB per jumlah jam kerja sebagai salah satu ukuran produktivitas, telah menurun dari 2,3% pada 2000 - 2007 menjadi 1,2% pada 2010 – 2017, bahkan pada 2019 diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 1,1% (Grafik 2). Kondisi di negara berkembang juga sejalan dimana pertumbuhan PDB per jumlah pekerja menurun dari 5,5% pada 2000 - 2007 menjadi 4,4% pada 2010 – 2017 dan pada 2019 diperkirakan kembali turun menjadi sekitar 3,3%.

¹ Pertumbuhan ekonomi potensial didefinisikan sebagai level pertumbuhan ekonomi (output) yang konsisten dengan inflasi yang stabil yakni inflasi yang tidak mengalami tekanan berlebihan atau deflasi secara berlebihan.



Grafik 1. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Potensial Global Sebelum dan Sesudah Krisis Keuangan Global 2007/08



Grafik 2. Produktivitas Perekonomian Global

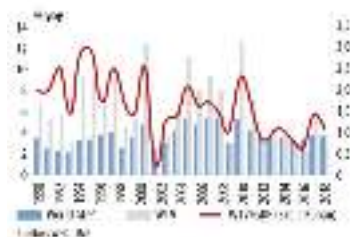
Faktor lain yang mempengaruhi penurunan produktivitas ialah fenomena usia penduduk dunia yang menua (*aging population*). Penuaan penduduk bukan hanya terjadi di beberapa negara maju, di beberapa negara berkembang fenomena tersebut juga mulai terlihat. Menurunnya tingkat kelahiran yang disertai dengan meningkatnya usia harapan hidup seiring dengan membaiknya perekonomian, banyak berpengaruh pada makin banyaknya porsi penduduk berusia lanjut. Data Wikipedia menunjukkan porsi penduduk usia di atas 65 tahun cukup banyak terlihat di negara-negara maju (Gambar 2).



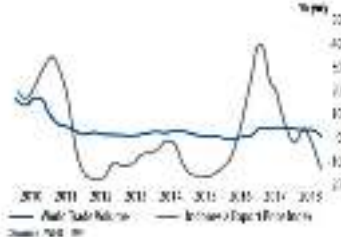
Gambar 2. Populasi Penduduk Berusia di Atas 65 Tahun (%)

2.2. Kebijakan 'Inward Looking' Meluas, Volume Perdagangan Dunia Menurun

Tantangan kedua yang perlu menjadi perhatian ialah meningkatnya kebijakan proteksionisme perdagangan di berbagai belahan dunia. Riset yang dilakukan oleh Gowling WLG pada 2017 menunjukkan bahwa sebanyak 60 negara terbesar di dunia telah menerapkan lebih dari 7.000 hambatan perdagangan, dengan mengenakan tarif lebih dari USD 400 miliar. Riset tersebut menunjukkan negara yang paling banyak menerapkan hambatan perdagangan terlihat di AS, Uni Eropa, India, Argentina, Rusia, dan Jepang. Kebijakan proteksionisme ini tentu makin meningkat bila dikaitkan dengan perkembangan terkini tentang ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok yang makin tinggi.



Grafik 3. Rasio Volume Perdagangan Dunia dengan Pertumbuhan Ekonomi Dunia



Grafik 4. Harga Komoditas dan Volume Perdagangan Dunia

Kebijakan proteksionisme yang meluas tentu berisiko membuat pasar global lebih sulit diakses dan volume perdagangan dunia berkurang. Akibatnya, volume perdagangan menurun tajam, meskipun pertumbuhan ekonomi dunia belum turun banyak (Grafik 3). Hal ini sejalan dengan temuan Constantinescu et.al (2015) menunjukkan elastisitas antara perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi dunia telah menurun bahkan sebelum krisis keuangan global 2007. Constantinescu et.al (2015) berargumen berkurangnya kebijakan liberalisasi perdagangan di tiap negara, termasuk potensi kebijakan proteksionisme perdagangan di individu negara, berkontribusi pada kondisi ini. Perkembangan ini bila terus berlanjut berisiko menurunkan prospek harga komoditas dunia, termasuk harga komoditas ekspor Indonesia seperti yang tergambar pada saat ini (Grafik 4).

2.3. Perkembangan Teknologi Digital dan Revolusi Industri 4.0

Perubahan struktural terakhir yang perlu mendapatkan perhatian ialah perkembangan pesat teknologi digital. Teknologi digital saat ini telah

memasuki hampir semua ruang lingkup kehidupan yang terindikasi berkontribusi mengubah perilaku masyarakat. Perkembangan pesat teknologi digital melalui inovasi yang diciptakannya juga membuat keyakinan bahwa dunia saat ini telah masuk ke dalam peradaban baru Revolusi Industri 4.0.²

Pada satu sisi, perkembangan pesat teknologi digital berdampak positif bagi kegiatan ekonomi. Teknologi digital, seperti terjadi pada revolusi industri sebelumnya, berpotensi meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Dengan teknologi digital, manusia dapat mengakses dan menjangkau banyak hal, termasuk produk, yang sebelumnya susah didapat. Teknologi digital juga dapat meningkatkan efisiensi penciptaan produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan selera pelaku ekonomi.

Pada sisi lain, teknologi digital juga memberikan tantangan. Tantangan bermula dari dampak perbedaan karakter usaha antara yang memanfaatkan dan tidak memanfaatkan teknologi digital. Tantangan yang dimunculkan teknologi digital banyak disebut sebagai sebuah disrupsi bagi perekonomian (*economic disruption*). Teknologi digital berisiko memperlebar ketimpangan ekonomi, melalui gangguan pada pasar tenaga kerja. Ketimpangan muncul karena meluasnya penggunaan teknologi digital yang menciptakan berbagai proses otomasi dalam berusaha. Proses otomasi kemudian mengurangi permintaan tenaga kerja dan menambah pengangguran, meskipun pada sisi lain produksi barang dan jasa akan bertambah sejalan efisiensi yang ditimbulkan dari proses otomasi.

Pengaruh teknologi digital dalam dunia ekonomi juga meluas ke dunia finansial, melalui berbagai inovasi yang sering disebut *Financial Technology* (Teknologi Finansial) atau disingkat Fintech (Tekfin). Fintech satu sisi telah membawa bentuk baru intermediasi keuangan dengan berbagai kemudahan dan manfaat pada perekonomian. Fintech memberikan ruang lebih besar kepada pelaku ekonomi untuk mengakses sumber keuangan yang lebih optimal. Namun, sisi lain Fintech juga memiliki risiko yang bila tidak direspons dengan baik dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.

2.4. Ketidakpastian Pasar Keuangan Global Dapat Meningkatkan

Berbagai prospek perubahan struktur ekonomi global tersebut berisiko memicu ketidakpastian pasar keuangan. Proses transisi perekonomian global dapat menimbulkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran yang berlebihan para pelaku pasar keuangan global. Bila ini berlanjut proses penyesuaian portofolio antar pasar di pasar keuangan yakni pasar saham, pasar obligasi, dan pasar valas, dapat terjadi di jangka pendek. Aliran modal dunia dapat bergerak secara volatile dengan risiko penempatan dana di negara berkembang akan berkurang. Risiko ini pada gilirannya dapat mendorong pelemahan mata uang negara berkembang dan berpengaruh kepada kesinambungan perekonomian global secara keseluruhan.

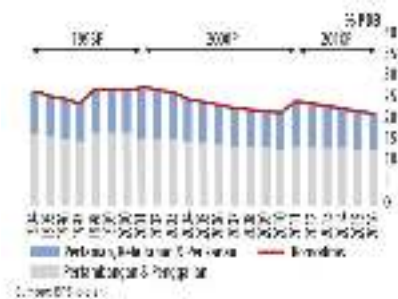
² Revolusi industri yang sebelumnya mengubah dunia dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok (Schwab, 2015). Revolusi industri I dimulai sejak penemuan mesin uap pada 1784 yang kemudian banyak mempengaruhi proses produksi. Revolusi industri II dimulai sejak penemuan listrik pada 1879 yang kemudian meningkatkan produksi secara signifikan. Revolusi industri III dimulai sejak penemuan awal teknologi informasi pada 1969 yang kemudian mendukung berbagai proses otomasi produksi.

3. TANTANGAN PEREKONOMIAN DOMESTIK

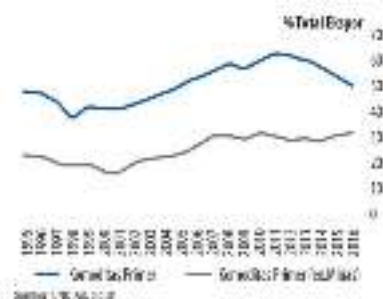
Pengaruh perubahan struktural perekonomian global makin perlu mendapatkan perhatian karena beberapa permasalahan struktural ekonomi domestik masih mengemuka. Permasalahan struktural perekonomian domestik tersebut berkaitan dengan kondisi di sektor riil dan sektor keuangan serta kualitas sumber daya manusia, dan daya dukung infrastruktur. Di sektor riil, tantangan berkaitan dengan masih besarnya peran komoditas dalam perekonomian dan kinerja sektor industri pengolahan yang menurun. Di sektor keuangan, tantangan berkaitan dengan sumber pembiayaan domestik yang belum secara permanen menopang kegiatan di sektor riil. Tantangan makin kuat karena kualitas sumber daya manusia dan daya dukung infrastruktur perlu terus ditingkatkan.

3.1. Peran Komoditas yang Tetap Besar dan Kinerja Industri Pengolahan yang Menurun

Berbagai indikator menunjukkan peran komoditas yang besar dalam perekonomian Indonesia. Total pangsa sektor primer seperti pertanian dan pertambangan dalam PDB masih belum berubah sejak tahun 1990an yakni di atas 20% (Grafik 5). Peran komoditas yang besar juga terlihat pada komposisi produk ekspor Indonesia yang banyak dipengaruhi komoditas produk pertambangan, termasuk ekspor migas (Grafik 6). Hal ini sejalan dengan keberadaan Indonesia yang merupakan salah satu produsen komoditas utama dunia, seperti CPO, batubara, karet, kopi, tembaga, nikel, timah, dan aluminium. Perkembangan ini pada gilirannya membuat dinamika perekonomian Indonesia sangat rentan dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global.



Grafik 5. Pangsa Sektor Komoditas terhadap PDB

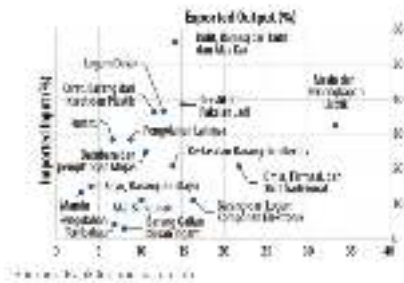


Grafik 6. Peran Komoditas dalam Total Ekspor Indonesia

Peran komoditas yang masih besar dalam perekonomian tidak terlepas dari kinerja sektor industri pengolahan dalam perekonomian Indonesia menurun. Pertumbuhan sektor industri pengolahan hanya berkisar 5% sejak tahun 2000 (Grafik 7). Perkembangan ini pada gilirannya membuat pangsa industri pengolahan terhadap PDB juga dalam tren menurun. Kondisi terkini menunjukkan pangsa industri pengolahan terhadap PDB sekitar 22%, lebih rendah dibandingkan dengan pangsa sebelum krisis Asia 1997 sekitar 25%. Kondisi yang perlu mendapatkan perhatian serius karena mempengaruhi upaya untuk memperkuat ketahanan dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi.



Grafik 7. Pertumbuhan dan Pangsa Sektor Industri Pengolahan terhadap PDB



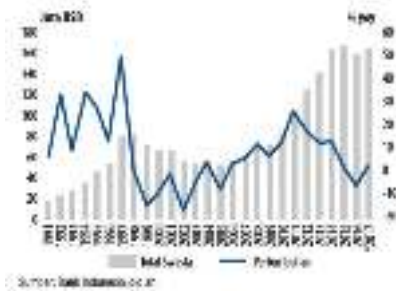
Grafik 8. Peran Impor dalam Sektor Industri Pengolahan

Peran sektor pengolahan yang menurun makin perlu dicermati karena input pada industri pengolahan masih banyak bersumber dari barang impor (Grafik 8). Perkembangan ini tidak terlepas dari menurunnya peran industri hulu dalam lanskap sektor industri domestik pasca krisis Asia. Kondisi tersebut tergambar pada kinerja industri dasar seperti industri logam dasar dan kimia dasar yang dalam tren menurun.

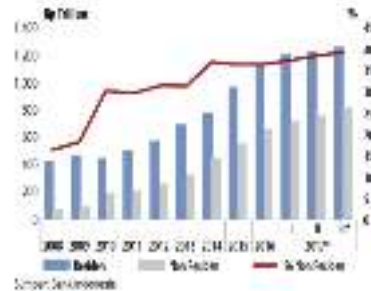
Satu tantangan yang juga beririsan dengan industri pengolahan ini ialah upaya mengoptimalkan potensi maritim Indonesia. Tantangan ini berkaitan dengan eksploitasi berlebihan terhadap perikanan laut. Permintaan yang meningkat akan makanan laut dan harga tinggi, dan ditambah dengan tindakan konservasi dan pengelolaan serta kontrol yang tidak mencukupi, telah memberi tekanan pada seluruh rantai nilai, termasuk kelebihan permintaan, penangkapan ikan ilegal, penggunaan alat tangkap dan praktik penangkapan ikan yang merusak, serta penipuan makanan laut. Kondisi ini pada gilirannya membuat peran perikanan tangkap menjadi tidak optimal dalam mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan (nelayan) belum tercapai, yang antara lain juga dipengaruhi pengelolaan pasca panen yang belum optimal dan kelembagaan perikanan yang belum mumpuni (Lampiran 1-3).

3.2. Kemampuan Pembiayaan Pembangunan yang Belum Optimal

Permasalahan struktural di sektor keuangan berkaitan juga dengan struktur pembiayaan domestik yang belum optimal. Sumber pembiayaan domestik masih banyak bergantung kepada kredit perbankan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lain dari nonbank seperti dari pasar saham dan pasar obligasi. Rasio pasar keuangan Indonesia terhadap PDB juga masih belum optimal dan berada di bawah negara tetangga. Struktur pembiayaan domestik yang belum optimal dan terbatas pada gilirannya menyebabkan kesenjangan pembiayaan yang akhirnya ditutupi dana asing, Aliran masuk dana asing ke perekonomian domestik membesar. Pertumbuhan utang luar negeri swasta mulai kembali positif sejak 2000, dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, didorong mudahnya dana global pasca kebijakan pelonggaran moneter negara maju (Grafik 9). Di pasar saham, pergerakan arus modal asing juga memiliki pengaruh cukup signifikan pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan. Peran dana asing di pasar Surat Berharga Negara juga cukup besar dimana pada September 2018 mencapai 36,9% dari keseluruhan nilai Surat Berharga Negara (Grafik 10).



Grafik 9. Posisi dan Pertumbuhan ULN Swasta



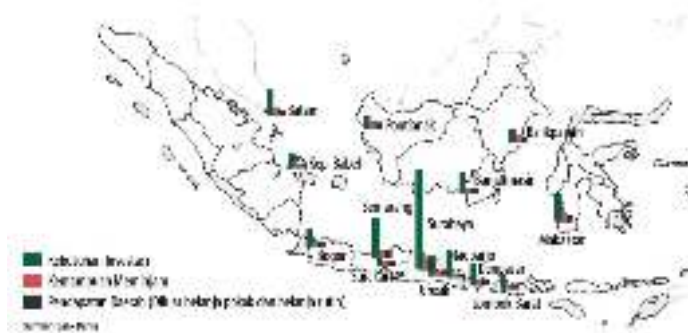
Grafik 10. Posisi SBN dan Porsi Asing

Peran sumber pembiayaan dari asing yang membesar semakin perlu dicermati karena pada sisi lain pasar keuangan juga belum cukup dalam. Hal ini antara lain tergambar pada masih kecilnya volume transaksi, serta sempitnya keragaman jenis instrumen pasar dan basis investor domestik. Pasar keuangan yang belum dalam pada gilirannya berisiko meningkatkan kerentanan pasar keuangan karena membuat pasar keuangan domestik bergejolak dengan mudah bila terdapat sedikit ketidakpastian.

Sumber pembiayaan juga dapat terkait dengan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan melalui pajak juga perlu ditingkatkan terindikasi pada masih rendahnya *tax ratio* Indonesia. Saat ini *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit berkisar 11,7% PDB, sedangkan dalam arti luas yang meliputi pula penerimaan berupa PNPB dan penerimaan terkait sumber daya alam sebesar 12,5% PDB. Pencapaian tersebut tertinggal dibandingkan dengan kondisi di Malaysia (15,5%), Thai-land (17%), Filipina (14,4%), dan Vietnam (13,8%).

Pentingnya sumber pembiayaan juga terkait dengan pembiayaan pembangunan infrastruktur, baik di Pusat maupun Daerah. Indikasi kebutuhan pendanaan untuk lima tahun ke depan (RPJMN 2015 – 2019) sekitar Rp5.519,4 triliun, yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan di bidang perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara, transportasi penyeberangan, lalu-lintas dan angkutan jalan, transportasi perkotaan dan transportasi multimoda. Dukungan dari sektor swasta melalui perbankan nasional untuk pembiayaan infrastruktur sampai saat ini belum begitu besar.

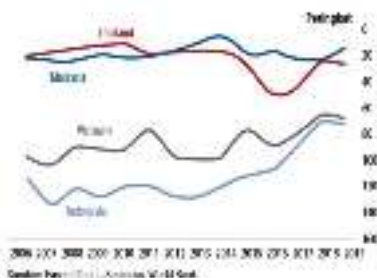
Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan investasi di sektor infrastruktur dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi tersebut, diperlukan sumber pembiayaan yang lebih luas. Pencarian sumber pembiayaan ini tidak hanya terbatas untuk Pemerintah Pusat saja, namun juga untuk Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan tanggung jawab penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian World Bank menunjukkan bahwa secara umum, kebutuhan infrastruktur di daerah enam kali lebih besar dibandingkan dengan kemampuan daerah untuk meminjam (Gambar 3).



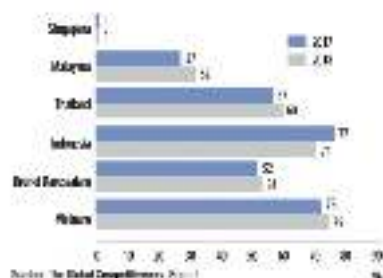
Gambar 3. Investasi dan Kesenjangan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

3.3. Iklim Berusaha dan Daya Dukung Infrastruktur Perlu Terus Ditingkatkan

Tantangan perekonomian domestik juga berkaitan dengan upaya memperkuat iklim usaha di Indonesia. Meskipun terus membaik dalam lima tahun terakhir, peringkat *ease of doing business* Indonesia 2019 yang masih berada di level 73 dan lebih rendah dibandingkan dengan peringkat beberapa negara kawasan, seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam, berimplikasi iklim berusaha di Indonesia perlu terus ditingkatkan (Grafik 11). Dari 10 indikator *ease of doing business* terdapat 4 indikator yang melemah, yakni izin mendirikan bangunan, perlindungan terhadap investor minoritas, perdagangan lintas batas, dan penegakan kontrak. Iklim usaha yang belum cukup bagus tersebut dapat menjadi kendala upaya mendorong investasi dan usaha-usaha produktif.



Grafik 11. Peringkat Kemudahan Berusaha



Grafik 12. Perbandingan Peringkat Infrastruktur

Iklim berusaha juga dipengaruhi oleh daya dukung infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan. Meskipun pembangunan telah cukup masif dilakukan pada beberapa tahun terakhir, ketersediaan dan kualitas infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan agar bisa bersaing dengan negara kawasan. Sebagai gambaran, *The Global Competitiveness Report* menunjukkan peringkat daya saing infrastruktur Indonesia tercatat pada level 71 pada 2018, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN (Grafik 12).

4. Prospek Perekonomian Indonesia

Kombinasi kedua tantangan dari global dan domestik perlu menjadi perhatian serius karena dapat mempengaruhi prospek ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka menengah. Hal ini karena komplikasi antara perubahan struktural perekonomian global dan struktur perekonomian yang rentan sangat berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Risiko tersebut termasuk membebani upaya Indonesia melepaskan diri dari jebakan kelompok negara berpendapatan menengah (*middle income trap* – MIT).

4.1. Prospek Perekonomian Jangka Pendek

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dalam jangka pendek prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi untuk terus meningkat, meskipun tahun ini sempat tertahan akibat kondisi global akibat meluasnya COVID-19. Didukung kebijakan makro dan kebijakan struktural serta respons yang diambil berbagai negara dalam mengatasi COVID-19, pertumbuhan ekonomi tahun depan diperkirakan akan meningkat ke 5,2-5,6 persen. Pertumbuhan tersebut terutama bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat serta pertumbuhan ekonomi dunia kembali menunjukkan perbaikan setelah tertekan oleh COVID-19. Konsumsi swasta di tahun ini diperkirakan mencapai kisaran 4,9-5,3 persen dan meningkat ke kisaran 5,0-5,5 persen di tahun depan, sementara pertumbuhan investasi diperkirakan meningkat dari kisaran 4,7-5,1 persen tahun ke sekitar 6 persen di tahun depan.

Prospek pertumbuhan ekonomi dalam dua tahun ke depan diperkirakan ditopang oleh sektor tersier di tengah kinerja sektor industri pengolahan yang tertekan. Pendorong utama pertumbuhan di tahun 2020-2021 diperkirakan berasal dari sektor pengangkutan dan komunikasi seiring dengan sektor infokom yang masih berpotensi meningkat ke depan. Sektor konstruksi juga tetap menopang pertumbuhan ekonomi seiring dengan proyek infrastruktur Pemerintah yang masih berjalan dan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan. Sementara itu, meskipun sempat tertahan di tahun ini akibat lemahnya ekspor, sektor industri pengolahan diperkirakan akan mengalami perbaikan di tahun depan.

Penguatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan disertai inflasi yang berada dalam sasarnya sebesar $3,0 \pm 1,0$ persen. Prospek inflasi tersebut ditopang oleh terjaganya seluruh komponen inflasi, baik inflasi inti, *volatile food prices* (VF), maupun *administered prices* (AP). Konsistensi kebijakandalam menjaga inflasi dalam rentang sasarnya berkontribusi terhadap pembentukan ekspektasi inflasi yang terjangkau ke sasaran inflasi. Dari sisi pasokan, koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik pusat maupun daerah, turut menjaga lebih terkendalinya inflasi, khususnya *volatile food prices*. Ke depan, bauran kebijakan Bank Indonesia serta koordinasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah melalui TPI diharapkan menjaga inflasi tetap terkendali dan berada dalam sasarnya.

4.2. Prospek Jangka Menengah-Panjang

Tantangan mengemuka bila terkait dengan prospek perekonomian dalam jangka menengah panjang. Hasil estimasi memperkirakan pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan hingga 2024 berpotensi meningkat dalam kisaran 5,5-6,1 persen. Namun demikian, angka proyeksi ini dapat tercapai bila berbagai terobosan kebijakan ditempuh. Apabila tidak ada terobosan-terobosan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berisiko berada di batas bawah rentang tersebut.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah hingga 2024 tersebut didukung oleh konsumsi dan investasi yang menguat serta ekspor neto yang membaik. Pertumbuhan konsumsi swasta dalam jangka menengah diperkirakan dalam teren meningkat. Prakiraan tersebut sejalan dengan prediksi peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan perekonomian domestik yang membaik. Selain itu, proporsi penduduk usia kerja dan kelas menengah dalam beberapa tahun mendatang juga akan turut mendukung penguatan konsumsi swasta. Seperti halnya konsumsi swasta, konsumsi Pemerintah dalam jangka menengah diperkirakan juga tumbuh cukup tinggi. Hal tersebut sejalan dengan perkiraan kenaikan pendapatan Pemerintah akibat perekonomian domestik yang menguat serta berbagai kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan.

Investasi juga diperkirakan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Peningkatan infrastruktur, seperti pembangkit listrik, jalan tol, pelabuhan dan bandara, diperkirakan akan dapat menekan biaya produksi dan distribusi. Hal tersebut diperkirakan akan dapat meningkatkan investasi. Sementara itu, reformasi struktural yang dijalankan Pemerintah diperkirakan akan membuat iklim investasi di Indonesia semakin baik. Produktivitas diperkirakan meningkat seiring dengan perbaikan iklim investasi dan pemanfaatan infrastruktur. Serangkaian kebijakan reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah turut berkontribusi terhadap pertumbuhan produktivitas. Peningkatan produktivitas tersebut, bersama dengan penambahan stok modal, diharapkan dapat mendorong penguatan sisi suplai sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih berkesinambungan.

Prospek ekspor dalam jangka menengah diperkirakan meningkat jika berbagai kebijakan struktural terus ditempuh. Sejalan dengan kebijakan struktural itu, pertumbuhan impor dalam jangka menengah diperkirakan juga menurun sejalan dengan meningkatnya daya saing produk domestik. Impor bahan baku untuk memproduksi produk-produk ekspor dan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik diperkirakan agak berkurang. Demikian halnya dengan impor barang-barang konsumsi juga diperkirakan mengalami penurunan meskipun konsumsi rumah tangga menguat. Kebutuhan impor antara lain berupa mesin, peralatan dan komponen untuk pengerjaan berbagai proyek infrastruktur, serta untuk investasi penggantian.

Prospek pertumbuhan ekonomi lebih jauh hingga 2046 juga dipengaruhi efektivitas kebijakan struktural yang ditempuh. Hal tersebut akan berkaitan dengan berapa besar tingkat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai sehingga mempengaruhi pergerakan Indonesia menuju negara

berpenghasilan tinggi. Apabila perekonomian Indonesia hanya tumbuh di sekitar 5 persen per tahun, maka Indonesia akan masuk ke dalam *middle-income trap*. Dengan skenario moderat, apabila pertumbuhan ekonomi di 2024 mencapai 5,5 persen dan pertumbuhan dapat dijaga 5,4 persen setelahnya, maka Indonesia diperkirakan akan menjadi negara berpendapatan tinggi (pendapatan per kapita minimal USD 12.375) pada tahun 2046. Namun, apabila pertumbuhan dapat dipacu lebih tinggi lagi mencapai 6,1 persen di tahun 2024 dan rata-rata 5,9 persen setelahnya, maka Indonesia diperkirakan akan menjadi negara berpendapatan tinggi lebih awal, yaitu pada tahun 2043 (Gambar 5).

Hasil identifikasi menunjukkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dalam jangka panjang sehingga Indonesia terhindar dari *middle income trap* membutuhkan penguatan di tiga area kebijakan. Pertama, produktivitas perekonomian secara keseluruhan—yang lazim diukur dengan *total factor productivity* (TFP)—perlu ditingkatkan jauh di atas rata-rata produktivitas yang telah diperoleh selama ini. Hal tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, antara lain, perbaikan infrastruktur, reformasi struktural, penguatan R&D untuk meningkatkan inovasi, serta penguatan institusi.

Faktor input kedua yang perlu ditingkatkan secara signifikan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen adalah stok kapital. Pertumbuhan stok kapital yang tinggi dapat dicapai melalui investasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta. Berbagai kebijakan untuk menarik dan mempermudah investasi perlu dilakukan untuk mendorong investasi swasta. Di sisi lain, untuk meningkatkan investasi Pemerintah ke tingkat yang lebih tinggi diperlukan upaya-upaya peningkatan penerimaan serta sumber-sumber pembiayaan.



Gambar 5. Indonesia Menuju Negara Berpendapatan Tinggi

Faktor input lainnya yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke tingkat di atas rata-rata adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dari sisi demografi, Indonesia memiliki keuntungan masih mempunyai bonus demografi. Namun, apabila kondisi demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik malah dapat menjadi beban bagi perekonomian. Untuk itu, peningkatan pendidikan, baik melalui pendidikan formal maupun melalui berbagai pelatihan sangat diperlukan untuk mencapai pertumbuhan di atas rata-rata. Rata-rata pendidikan formal penduduk usia kerja di Indonesia yang saat ini hanya mencapai sekitar 9 tahun perlu ditingkatkan. Selain itu, pendidikan vokasional juga akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkaya *skill* untuk mempersiapkan pekerja agar tetap berada pada kelompok angkatan

kerja di tengah tantangan adanya proses otomatisasi pada industri. Pendidikan vokasional diharapkan selain menghindari pekerja keluar dari angkatan kerja akibat akibat *structural shifting* pada *labor demand*, juga diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi penduduk usia produktif untuk bergabung dalam angkatan kerja. Seiring dengan semakin majunya perekonomian dan upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas SDM, indeks pembangunan manusia (IPM) diharapkan terus membaik.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu saja perlu disertai dengan keseimbangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Keseimbangan internal antara lain tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil, sementara keseimbangan eksternal terindikasi dari antara lain Neraca Pembayaran. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan implikasinya terhadap stabilitas harga dan Neraca Pembayaran. Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan akan tetap terjaga dalam kisaran $3,0 \pm 1,0$ persen. Hal tersebut didukung oleh kebijakan makro yang efektif serta penguatan koordinasi antar otoritas dalam pengendalian inflasi.

Sejalan dengan berbagai prospek ekonomi domestik tersebut, Neraca Pembayaran Indonesia dalam jangka menengah diprakirakan akan berada dalam tren yang membaik sejalan dengan penurunan defisit neraca transaksi berjalan dan penguatan Transaksi Modal dan Finansial. Dalam jangka menengah defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan terus menurun menuju 2 persen dari PDB, terutama disebabkan oleh upaya-upaya mendorong ekspor dan mengurangi ketergantungan impor yang diperkirakan cukup berhasil. Sementara itu, akselerasi perekonomian domestik sebagai dampak dari reformasi struktural dan ketersediaan infrastruktur diharapkan akan memicu aliran modal asing yang makin meningkat, baik melalui investasi langsung maupun investasi portofolio. Hal tersebut pada gilirannya akan menopang perbaikan Transaksi Modal dan Finansial.

5. SASARAN AKHIR DAN PENGUATAN MODEL PERTUMBUHAN EKONOMI

Respons kebijakan yang tepat diperlukan guna menghindarkan Indonesia ke dalam fenomena *middle income trap*. Berbagai kebijakan yang perlu ditempuh diujikan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan inklusif (Gambar 5). Definisi negara yang maju dan inklusif ialah negara yang pertumbuhan ekonomi dapat terus tinggi serta ditopang oleh stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan yang terkendali. Ketahanan eksternal juga tetap terjaga ditandai oleh defisit transaksi berjalan yang menurun dan ditopang oleh sumber pembiayaan yang permanen. Kemajuan ekonomi juga bersifat inklusif karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dirasakan oleh berbagai lapisan pendapatan. Terakhir pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemiskinan dan pengangguran yang rendah serta ketimpangan pendapatan antar golongan yang kecil.



Gambar 6. Sasaran Akhir, Modal Dasar dan Strategi Kebijakan

Respons kebijakan tersebut ditempuh dengan memperkuat model pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas modal dasar pembangunan yang dimiliki untuk mendukung pencapaian sasaran akhir tersebut (Gambar 6). Modal dasar tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat kualitas faktor produksi berupa peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta penguatan kelembagaan.

5.1. Memperkuat Peran Faktor Produksi

5.1.1. Kualitas SDM dan Tenaga Kerja

Kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerja memegang peranan penting dalam peningkatan daya saing. Tenaga kerja yang berkualitas, dengan pendidikan dan ketrampilan yang tinggi, merupakan modal dasar pembangunan yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja perlu terus ditingkatkan. Mengingat besarnya kebutuhan tenaga kerja terampil di bidang-bidang tertentu, upaya untuk pemenuhannya dalam waktu cepat perlu segera dilakukan. Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan kualitas SDM. Hal ini diperlukan mengingat kemajuan industri nasional, yang antara lain ditandai dengan

penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi, otomasi dan produktivitas yang tinggi, serta penggunaan teknologi maju, hanya bisa dilakukan oleh SDM yang memiliki keterampilan tinggi.

Namun demikian, kondisi ketenagakerjaan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik yang berasal dari sisi permintaan maupun sisi penawaran. Dari sisi permintaan, tantangan utama bersumber dari perlambatan pertumbuhan sektor manufaktur akibat gejala deindustrialisasi sehingga menyebabkan stagnasi dalam komposisi tenaga kerja Indonesia. Dalam hal ini, komposisi tenaga kerja menjadi tidak berimbang dan sebagian terserap di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian tinggi, seperti di sektor pertanian, sektor perdagangan, dan jasa pariwisata. Sementara itu, permintaan tenaga kerja ke depan pada era industri 4.0 menghendaki perubahan keahlian dan keterampilan tenaga kerja yang relatif tinggi, baik di sektor pertanian, sektor industri manufaktur maupun sektor jasa.

Perubahan permintaan tenaga kerja juga disebabkan oleh lambatnya laju pertumbuhan lapangan kerja formal. Sektor industri manufaktur dan sektor jasa sebagian sudah mengadopsi teknologi otomatisasi yang bersifat padat modal dibandingkan penciptaan lapangan kerja formal. Sektor industri padat karya yang di masa lalu merupakan primadona dalam penciptaan lapangan kerja formal (antara lain: industri makanan/minuman, tekstil, alas kaki, rokok), saat ini mulai mengadopsi teknologi otomatisasi.

Dari sisi penawaran, tantangan utama yang dihadapi yaitu lambatnya lembaga pendidikan formal dan informal dalam merespon perubahan sisi permintaan tenaga kerja. Sebagian besar pekerja Indonesia masih berpendidikan dasar dengan keahlian dan ketrampilan yang sangat terbatas, yaitu sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), hanya sebagian kecil saja yang berpendidikan menengah (SMA/ SMK) dan pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Kesenjangan pendidikan antar daerah baik dari sisi formal maupun informal juga masih cukup besar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pasar tenaga kerja ke depan, yaitu memenuhi permintaan tenaga kerja yang berubah dengan cepat akibat kemajuan teknologi industri 4.0

Untuk mendorong pengembangan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, diperlukan kebijakan yang konsisten dalam merespons perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja tersebut. Dalam jangka pendek, Pemerintah perlu secara konsisten melanjutkan upaya perbaikan kualitas iklim usaha (kemudahan perizinan usaha). Di samping itu, pelatihan pemanfaatan teknologi informasi untuk perdagangan (*e-commerce*) dapat diarahkan untuk mendorong usaha mikro dan kecil dapat naik kelas menjadi usaha menengah dan besar.

Dalam jangka menengah-panjang, Pemerintah perlu membangun sistem pendidikan dari tingkat dasar, menengah maupun tinggi yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara luas. Hal ini diperlukan untuk mendorong penelitian dan pengembangan (R&D) yang dapat menopang inovasi produk maupun perbaikan proses produksi. Pemerintah juga perlu terus mendorong link and match, yakni menghubungkan dan mencocokkan

kebutuhan SDM dunia usaha dengan SDM yang dihasilkan oleh sekolah dan perguruan tinggi, antara lain melalui sekolah vokasi yang sejalan dengan kebutuhan industri. Kurikulum pendidikan juga perlu ditinjau kembali guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini, terutama terkait dengan semakin terintegrasi dan terbukanya perekonomian global dan perkembangan teknologi digital.

5.1.2. Pembangunan Infrastruktur

Akumulasi kapital antara lain ditopang oleh investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur. Dalam kaitan ini, Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan daya dukung infrastruktur, terutama untuk meningkatkan konektivitas dan penyediaan energi. Peningkatan kapasitas infrastruktur konektivitas diarahkan untuk mendukung penguatan sistem transportasi dan logistik nasional. Dengan ketersediaan infrastruktur secara luas, transportasi dan logistik menjadi lebih efisien yang pada gilirannya juga akan meningkatkan TFP. Hal tersebut akan meningkatkan daya saing sehingga berdampak positif dalam pengembangan industri nasional.

Pembangunan infrastruktur juga terkait dengan infrastruktur energi. Dalam kaitan ini, Pemerintah perlu melanjutkan upaya peningkatan kapasitas penyediaan energi, antara lain melalui penyelesaian pembangunan pembangkit listrik dan mendorong pencapaian target bauran energi. Hal ini akan membuat harga energi, seperti listrik dan gas, menjadi lebih murah dan berdampak positif bagi daya saing industri. Dengan harga energi yang lebih murah, beberapa jenis industri pengolahan yang menggunakan energi dalam jumlah besar, seperti industri logam dasar dan industri kertas, akan dapat lebih berkembang.

Infrastruktur juga berhubungan dengan infrastuktur untuk peningkatan konektivitas karena akan mendorong keterhubungan antardaerah dan mendukung aksesibilitas ke destinasi pariwisata. Pembangunan infrastruktur tersebut tentunya perlu dilanjutkan, termasuk untuk mendukung perkembangan kawasan industri baru di luar Jawa. Pembangunan infrastruktur perlu diletakkan dalam konteks yang lebih luas, misalnya dengan mengaitkannya dengan pembangunan kawasan industri atau pun kawasan ekonomi khusus. Dengan pendekatan demikian, infrastruktur akan dapat langsung dimanfaatkan oleh industri.

Dalam strategi implementasinya, pembangunan infrastruktur perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan impor karena akan memengaruhi defisit transaksi berjalan. Penggunaan konten impor selain dapat memperburuk defisit transaksi berjalan, juga tidak mendorong berkembangnya industri lokal akibat demand yang kurang. Dalam konteks ini, maka penggunaan konten lokal perlu menjadi prioritas, namun dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan. Pembangunan infrastruktur yang besar sebisa mungkin menumbuhkan value chain bagi produk lokal agar menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia.

5.2. Memperkuat Peran Teknologi Digital dan Mempertajam Inovasi

5.2.1. Penguatan Peran Teknologi Digital

Peran teknologi digital, baik berupa industri 4.0 maupun ekonomi keuangan digital, perlu terus diperkuat. Industri 4.0, yang ditandai dengan otomasi dan digitalisasi proses produksi, diperkirakan akan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian secara signifikan. Sebagaimana diketahui, saat ini sebagian besar industri pengolahan di Indonesia merupakan industri padat karya, antara lain industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, serta alas kaki. Penerapan industri 4.0 perlu memperhitungkan *benefit-cost*-nya untuk perekonomian secara luas. Di samping dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan, penerapan industri 4.0 tersebut diperkirakan akan mengurangi penyerapan tenaga kerja. Pemerintah perlu hadir untuk menjembatani antara kepentingan perusahaan yang berusaha meningkatkan produktivitas dan efisiensinya dan kepentingan tenaga kerja. Pemerintah perlu turut membantu tenaga kerja yang terdampak oleh penerapan industri 4.0 tersebut, misalnya dengan memberikan pelatihan keterampilan untuk beralih profesi.

Ekonomi dan keuangan digital di Indonesia tumbuh cukup pesat. Saat ini terdapat sekitar 265 perusahaan yang bergerak di bidang fintech dan 200 perusahaan *e-commerce*. Perannya dalam perekonomian perlu terus diperkuat, dengan tetap mewaspadaikan dan memitigasi risiko yang ditimbulkannya. Kebijakan diarahkan agar ekonomi keuangan digital tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian serta akses masyarakat terhadap sumber daya, termasuk keuangan (inklusivitas). Dorongan terhadap pemanfaatan ekonomi keuangan digital dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Digitalisasi membawa konsekuensi risiko, antara lain *shadow banking*, *cybersecurity*, AML-CFT, proteksi data, dan risiko operasional yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan. Tantangan bagi regulator adalah perlunya menyeimbangkan antara upaya mengoptimalkan manfaat dan sekaligus memitigasi risiko.

Dalam upaya penguatan peran ekonomi dan keuangan digital, kebijakan yang ditempuh oleh otoritas perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (i) perlu *interlink* yang kuat antara keuangan digital dan ekonomi digital agar tercipta ekosistem yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan perekonomian secara keseluruhan, (ii) perbankan perlu didorong untuk bertransformasi digital secara *end-to-end*, (iii) kolaborasi antara bank dan fintech perlu diperkuat dan diperluas, (iv) perlu penguatan regulasi, *entry-policy*, pelaporan dan pengawasan yang selaras dengan tuntutan era digital, (v) keterbukaan ekonomi perlu memperhatikan prinsip *national interest*, dan (vi) perluasan akseptasi digital perlu terus didorong.

Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya memperkuat peran ekonomi keuangan digital, antara lain: memfasilitasi agar UMKM dapat terdaftar sebagai *merchant* uang elektronik tanpa harus memiliki rekening bank; memfasilitasi digitalisasi UMKM baik terkait dengan *e-commerce* maupun *digital payment*; melakukan program elektronifikasi dalam penyaluran bansos dan subsidi, transaksi Pemerintah,

dan elektronifikasi pembayaran transportasi; serta mendorong perkembangan infrastruktur digital (di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) terkait dengan pendaftaran dan administrasi efek dan di bank kustodian terkait dengan otomasi proses rekonsiliasi). Koordinasi dan sinergi antar otoritas juga perlu terus digalakkan. Bank Indonesia perlu terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar pengembangan keuangan digital di bidang sistem pembayaran dapat saling mendukung dengan pengembangan keuangan digital di bidang intermediasi keuangan.

Sementara itu, terkait dengan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, Pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi dan edukasi mengenai teknologi digital kepada masyarakat serta mempersiapkan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik selaku konsumen maupun produsen. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan layanan digital, semakin besar dan semakin kuat pula peran ekonomi dan keuangan digital dalam perekonomian. Berbagai upaya untuk perlindungan konsumen juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan terlindungi dalam bertransaksi dengan perusahaan fintech dan *e-commerce*. Pada gilirannya, kedua hal tersebut akan semakin meningkatkan dan memperkuat peran ekonomi keuangan digital dalam perekonomian.

Perkembangan ekonomi keuangan digital juga erat kaitannya dengan sistem pembayaran. Bank Indonesia telah menyusun visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang meliputi: (i) mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital nasional sehingga menjamin fungsi bank sentral dalam proses peredaran uang, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan, serta mendukung inklusi keuangan, (ii) mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi-keuangan digital melalui *open-banking* maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan, (iii) menjamin *interlink* antara fintech dan perbankan untuk menghindari risiko *shadow-banking* melalui pengaturan teknologi digital (seperti API, kerjasama bisnis, dan kepemilikan perusahaan), (iv) menjamin keseimbangan antara inovasi dan *consumer protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat melalui penerapan KYC dan AML-CFT, kewajiban keterbukaan data/informasi/bisnis publik, dan penerapan *reg-tech* dan *sup-tech* dalam kewajiban pelaporan, regulasi dan pengawasan, serta (v) menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara melalui kewajiban pemrosesan semua transaksi domestik di dalam negeri dan kerjasama penyelenggara asing dengan domestik, dengan memperhatikan prinsip resiprokalitas.

5.2.2. Penajaman Inovasi

Kebijakan ini ditempuh mempertimbangkan peringkat inovasi Indonesia yang tergolong rendah dibandingkan dengan peringkat beberapa negara lain, seperti Malaysia, Tiongkok dan India. Ini menjadi penting karena inovasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan *technological progress* atau TFP. Melalui inovasi, dihasilkan proses produksi yang lebih efisien dan produk yang lebih berkualitas. Upaya untuk mendorong inovasi

perlu terus didorong, antara lain dengan menggalakkan penelitian dan pengembangan, termasuk mendorong kegiatan penelitian di perguruan tinggi. Hubungan antara dunia usaha dan perguruan tinggi juga perlu diperkuat guna mendorong tumbuh kembangnya inovasi, termasuk kemungkinan dikembangkannya *innovationhub* yang menampung seluruh produk inovasi perguruan tinggi untuk dipasarkan kepada industri dan meningkatkan hubungan antar keduanya. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual (HAKI) juga perlu ditingkatkan agar insentif untuk berinovasi terjaga.

Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan pajak untuk perusahaan yang mengalokasikan sejumlah tertentu dana untuk pengembangan pegawai dan *research* dapat mendorong perusahaan meningkatkan *training and research budget*. Insentif dapat diberikan dengan memberikan potongan pajak tertentu apabila perusahaan telah mencapai *threshold* tertentu terhadap proporsi *budget training* dan riset. Peningkatan peran swasta dalam peningkatan produktivitas sangat diperlukan untuk melengkapi alokasi budget terkait pengembangan sumber daya manusia yang sudah ditetapkan pada APBN. Mengacu pada negara-negara lain, sektor swasta merupakan pemain utama tumbuhnya inovasi baru yang mendorong produktivitas dan memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi.

5.3. Memperbaiki Kelembagaan dan Iklim Usaha

Perbaikan iklim usaha tidak saja dapat meningkatkan kapital melalui investasi tetapi juga dapat meningkatkan *technological progress* atau TFP. Perbaikan iklim usaha diperlukan untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha produktif. Iklim usaha yang baik antara lain ditandai dengan kemudahan mengurus perizinan, adanya kepastian hukum, stabilitas sosial politik, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan, yang semuanya itu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi dan distribusi. Iklim usaha yang baik akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan pada gilirannya akan meningkatkan daya saing. Perbaikan iklim usaha bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat luas pun perlu turut berkontribusi guna memperbaiki iklim usaha. Untuk mendorong ekspor, misalnya, Pemerintah telah melakukan simplifikasi prosedur ekspor-impor dengan mendirikan *Indonesia National Single Window* (INSW). Optimalisasi INSW tersebut terus dilakukan, antara lain melalui integrasi sistem dan standarisasi layanan.

Upaya memperkuat kelembagaan untuk mendukung daya saing ditempuh juga melalui kebijakan perdagangan dan keuangan internasional. Dalam jangka pendek, beberapa kebijakan perdagangan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Pertama, pendekatan bilateral kepada Amerika Serikat perlu dilakukan terkait isu: (1) perpanjangan fasilitas GSP tahun 2018; (2) pengecualian penenaan tarif baja dan aluminium; (3) mengeluarkan Indonesia dari target 16 negara penyebab defisit neraca perdagangan AS; (4) pemanfaatan celah perang dagang AS-Tiongkok di pasar AS; dan (5) menggantikan produk India dan Turki yang kehilangan GSP di pasar AS. Kedua, pemanfaatan perdagangan bilateral dengan Tiongkok terkait dengan pemanfaatan celah perang dagang AS Tiongkok di pasar Tiongkok, dan

pengamanan perdagangan melalui tindakan *trade remedies*. Ketiga, mempercepat ratifikasi sejumlah perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) dengan negara mitra dagang yang sudah diselesaikan.

Dalam jangka menengah panjang, kebijakan perdagangan dan keuangan internasional yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: (1) mendorong pemanfaatan FTA oleh eksportir pusat dan daerah; (2) mengatasi berbagai hambatan ekspor di negara mitra dagang; (3) meningkatkan akses pasar ekspor melalui PTA, FTA, dan CEPA; (4) memaksimalkan instrumen *trade remedy* (*safeguards*, *anti dumping* dan *anti subsidy*); (5) meningkatkan kerjasama produsen karet Indonesia-Thailand- Malaysia melalui ITRC; dan (6) kerjasama pembentukan *Council of Palm Oil Producing Countries* (CPOPC).

6. PENAJAMAN STRATEGI KEBIJAKAN

Dalam tataran implementasi kebijakan, upaya mencapai sasaran akhir tersebut kemudian diejawantahkan melalui strategi kebijakan. Strategi pembangunan meliputi lima kebijakan penting. Pertama, terkait dengan pengelolaan kebijakan makroekonomi yang sehat. Kedua, tentang kebijakan tentang sektor unggulan. Ketiga, mengenai kebijakan memperkuat UMKM dan keempat berupa kebijakan untuk meningkatkan potensi sistem ekonomi syariah. Terakhir, strategi diarahkan untuk memperkuat sumber pembiayaan guna menopang berbagai kebijakan yang akan ditempuh. Secara umum, kelima strategi kebijakan tersebut dapat dijalankan secara beriringan. Dalam pelaksanaannya, dapat ditentukan prioritas di masing-masing strategi kebijakan tersebut berdasarkan kebutuhan dan urgensinya.

6.1. Mempertahankan Kebijakan Makroekonomi yang Disiplin dan Berhati-hati

Pertama kebijakan diarahkan untuk dapat menjaga stabilitas perekonomian tetap menjadi prakondisi kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini maka pengelolaan kebijakan makroekonomi yang sehat, baik kebijakan fiskal dan kebijakan moneter serta ditopang kebijakan makro-mikroprudensial, perlu terus dijaga. Operasi keuangan pemerintah tetap dalam koridor menjaga kesinambungan fiskal utang pemerintah dapat terus menurun berada dalam koridor yang sehat. Kebijakan moneter tetap berhati-hati dan konsisten menjaga stabilitas nilai rupiah, baik inflasi maupun nilai tukar rupiah. Selain itu, kebijakan makro-mikroprudensial tetap ditempuh secara disiplin sehingga dapat mendukung stabilitas sistem keuangan.

6.2. Memperkuat Kebijakan Sektorial

Kebijakan sektoral merupakan penjabaran lebih dalam untuk mendukung kebijakan makroekonomi. Kebijakan sektoral perlu terus diperkuat karena akan memberikan basis lebih kuat bagi upaya mencapai Indonesia menjadi negara maju dan inklusif. Kebijakan sektoral ini terkait dengan kebijakan memperkuat ketahanan pangan dan energi. Selain itu, kebijakan dikaitkan dengan penguatan kebijakan sektor unggulan seperti sektor industri pengolahan, sektor pariwisata, sektor maritim, dan industri kreatif.

6.2.1. Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi

Ketahanan pangan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan permasalahan mendasar yang perlu dibenahi. Pertumbuhan penduduk serta meningkatnya usia harapan hidup dan pendapatan, mendorong meningkatnya ketersediaan pangan yang berkesinambungan, dengan harga terjangkau dan dalam jumlah cukup. Sebagai komoditas yang merupakan input faktor produksi, ketersediaan serta kestabilan harga pangan dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tren harga pangan yang terus meningkat dalam jangka menengah panjang, perubahan iklim dan demografi, peningkatan urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi dapat mempengaruhi upaya mencapai dan menjaga ketahanan pangan nasional.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemakmuran rakyat, reformasi berupa penguatan ketahanan pangan, (termasuk air) sangat diperlukan. Di Indonesia, upaya menjaga ketahanan pangan menghadapi tantangan dari belum optimalnya pengelolaan produksi dan pasokan serta distribusi dan tata niaga komoditas pangan. Hal tersebut menjadi penyebab utama masih tingginya disparitas harga komoditas pangan di Indonesia, baik disparitas harga dengan negara *peer* dan disparitas harga antar daerah di Indonesia. Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional khususnya dalam penciptaan kesempatan kerja juga semakin menurun. Struktur tenaga kerja sektoral pertanian juga terlihat semakin menurun.

Berdasarkan kondisi tersebut maka beberapa tantangan mengemuka dalam melakukan reformasi pangan nasional. Pertama, tantangan peningkatan produksi dan pasokan. Kedua, tantangan pemenuhan infrastruktur pertanian. Ketiga, tantangan pembiayaan. Keempat, tantangan distribusi, logistik dan tata niaga pangan. Kelima, tantangan struktur pasar.

Dari tahun ke tahun, luas lahan pertanian, terutama di Jawa, terus menunjukkan penurunan. Luasan lahan irigasi di Jawa selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan sebesar lebih dari 73 ribu hektar yang artinya potensi produksi padi sebesar sekitar 850 ton padi juga sirna. Alih fungsi lahan turut berperan dalam menurunkan kualitas air dan tanah, yang berisiko mengancam ketahanan pangan. Kualitas air sungai mengalami penurunan oleh cemaran industri baik industri rumah tangga, kecil, menengah maupun besar. Perbaikan dan pembangunan irigasi yang telah dilakukan perlu terus dilakukan bahkan ditingkatkan. Perlu dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan air melalui sistem irigasi dan drainase. Di samping itu, perlu didorong penggunaan benih dan varietas yang tahan kekeringan.

Distribusi, logistik dan tata niaga pangan relatif masih belum efisien. Keterbatasan petani dalam mencari outlet penjualannya, memunculkan pekerjaan pengepul yang berfungsi mengumpulkan hasil pertanian dari para petani. Para pengepul itu dapat berdiri sendiri atau menjadi bagian darirantai distributor/*supplier* dalam rantai pedagang selanjutnya. Kurang mendukungnya sarana transportasi dan logistik pangan Daerah dengan cakupan wilayah yang luas menyebabkan jalur distribusi yang panjang dengan biaya yang tidak sedikit yang kemudian berdampak pada panjangnya rantai tata niaga dari petani ke konsumen.

Panjangnya rantai perdagangan tersebut turut mempengaruhi besarnya margin keuntungan yang apabila diakumulasi, maka margin keuntungan terbesar terletak di pedagang. Di sisi lain, kita melihat struktur pasar yang masih relatif lemah. Proses pembentukan harga kurang berlangsung efisien yaitu cenderung mengikuti harga dari beberapa pemain dominan. Kita melihat masih banyak ruang bagi perbaikan pengelolaan pangan nasional. Kebijakan-kebijakan perlu diarahkan untuk mendukung reformasi pangan, utamanya dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pangan nasional, mengatur distribusi dan tata niaga yang lebih efisien, serta mengatur pembentukan harga yang wajar dan stabil baik mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, didapati bahwa kelembagaan petani yang masih relatif lemah dan berisiko membuat akses pembiayaan petani menjadi terbatas dan sangat bergantung pada pembiayaan informal. Sebagian besar pembiayaan usaha pertanian bersumber dari pembiayaan perseorangan.

Berdasarkan tantangan tersebut, beberapa kebijakan dapat ditempuh bagi perbaikan pengelolaan pangan nasional. Pertama, mendorong Peningkatan Produksi dan Pasokan Pangan. Dalam kaitan ini, beberapa hal dapat ditempuh yakni: (a) penerapan reformasi agraria sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi melalui pola klastering produksi pertanian, (b) pengaturan waktu (*timing*) produksi beras untuk kebutuhan yang merata sepanjang tahun disertai peningkatan kapasitas dan jumlah sarana dan prasarana produksi, (c) penugasan dan penunjukkan wilayah atau daerah untuk melakukan produksi komoditas tertentu disertai peningkatan peran daerah untuk berinovasi dalam peningkatan produksi pangan, dan (d) penguatan kelembagaan petani melalui penerapan *corporate* atau *cooperative farming* dan pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP).

Kedua, memperkuat Infrastruktur Pertanian. Kebijakan diprioritaskan pada beberapa hal yakni: (a) percepatan pembangunan proyek infrastruktur penunjang produksi pangan dan infrastruktur konektivitas sebagaimana tertuang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), (b) percepatan pembangunan dan perbaikan irigasi, terutama irigasi sekunder dan tersier, untuk dapat mengairi seluruh sawah, terutama di daerah-daerah yang memiliki dampak pengganda produksi pangan yang lebih besar, dan (c) peningkatan peran fiskal dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, mendorong Peningkatan Pembiayaan di Sektor Pertanian. Kebijakan ini ditempuh melalui: (a) Pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap fiskal, (b) Pengaturan dan optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur pendukung produksi pertanian, (c) Penyelesaian program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dalam 3 tahun.

Keempat, meningkatkan Distribusi, Logistik, dan Perbaikan Tata Niaga Pangan. Kebijakan ini ditempuh melalui: (a) Pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi, termasuk koordinasi antardaerah dan pengembangan Toko Tani Indonesia (TTI), (b) Optimalisasi peran BUMN dan BUMD untuk meningkatkan distribusi komoditas pangan antar daerah terutama dari daerah surplus kepada daerah defisit pangan, (c) Pemanfaatan sistem informasi untuk mendukung optimalisasi distribusi pangan, dan (d) Pengaturan distribusi pangan melalui penguatan pengaturan oleh pemerintah, serta penetapan kebijakan impor yang tepat waktu dengan dukungan data sistem logistik dan distribusi.

Kelima, membenahi Struktur Pasar. Kebijakan ini ditempuh melalui: (a) Penguatan pengaturan distribusi pangan oleh Pemerintah, melalui pengaturan pelaku usaha distribusi terdaftar, dan monitoring harga sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara kawasan, (b) Optimalisasi

peran BULOG sebagai lembaga penyangga untuk mendukung stabilisasi harga pangan, serta penyediaan alternatif pasokan komoditas strategis seperti jagung, serta penguatan pemantauan harga dan pasokan dengan dukungan sistem informasi dan harga yang terintegrasi, terutama menjelang hari besar keagamaan nasional, dan (c) Optimalisasi peran Pemerintah Daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi daerah, khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sejalan dengan upaya penguatan pangan, penguatan ketahanan energi juga perlu terus diperkuat. Di Indonesia, perubahan pola hidup masyarakat dengan semakin meningkatnya jumlah kelas menengah memerlukan dukungan pasokan energi yang semakin besar.

Sektor-sektor prioritas yang menjadi andalan mesin pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri, sektor pariwisata, dan industri kreatif juga memerlukan dukungan pasokan maupun ketergantungan energi yang relatif besar. Selain itu, kebutuhan energi yang semakin besar juga disebabkan oleh semakin berkembangnya ekonomi digital, dimana penggunaan internet dan teknologi dalam aktivitas ekonomi juga semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut tidak dapat dihindari akan semakin meningkatkan kebutuhan energi Indonesia. Hal ini juga menyebabkan peran Indonesia semakin besar dalam pasar energi dunia dan dalam upaya penurunan emisi rumah kaca global. Sementara itu, Indonesia telah menjadi negara net importer BBM sejak 2004, dengan sepertiga dari konsumsi BBM dipenuhi oleh impor (2016). Kebutuhan energi masih didominasi oleh BBM. Jika konsumsi BBM meningkat tanpa ada perubahan pola pemakaian energi, khususnya di sektor transportasi, maka akan mengganggu keberlangsungan dan ketahanan energi. Selain itu, komitmen penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia juga bisa sulit tercapai.

BBM masih menjadi sumber energi final utama akibat penggunaan teknologi saat ini yang masih berbasis BBM, terutama di sektor transportasi. Sektor-sektor pengguna lainnya juga tidak terlepas dari penggunaan BBM. Hal ini dikarenakan teknologi tersebut masih cukup efisien dan harga BBM yang kompetitif dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Pangsa kebutuhan BBM masih lebih dari 40% dan diperkirakan akan terus mendominasi meskipun pangasanya akan menurun pada jangka panjang (BBPT, *Indonesia Energy Outlook* 2018).

Kebutuhan energi final di sektor industri diperkirakan akan meningkat. Sektor industri merupakan sektor yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya untuk memperkuat peran sektor industri perlu diimbangi dengan pemenuhan pasokan energi. Pangsa kebutuhan energi final sektor industri diproyeksikan meningkat dari semula 35,5% pada tahun 2016 menjadi 46,8% pada tahun 2050 (BPPT, 2018).

Sementara itu, kebutuhan energi di sektor transportasi juga perlu menjadi perhatian, mengingat sektor tersebut merupakan pendukung aktivitas semua sektor yang menggunakan energi. Kebutuhan energi sektor transportasi

tidak hanya dipengaruhi oleh penambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun juga dipengaruhi oleh perkembangan sektor ekonomi lainnya yang memiliki *forward* dan *backward linkage* cukup tinggi dengan sektor transportasi.

Jenis energi yang digunakan oleh setiap sektor sangat bervariasi. Sektor industri saat ini banyak menggunakan gas, batubara, dan listrik. Pada tahun 2050 diperkirakan kebutuhan energi tersebut terus meningkat dan menggantikan BBM yang harganya lebih mahal.

Di tengah kebutuhan energi yang meningkat dari waktu ke waktu, pasokan energi dari dalam negeri justru semakin terbatas. Produksi minyak di dalam negeri cenderung menurun di tengah konsumsi yang meningkat, sehingga kekurangan produksi harus ditutup oleh impor. Produksi gas juga cenderung menurun. Dari waktu ke waktu, ketergantungan pada sumber energi fosil semakin meningkat. Hal tersebut, selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang semakin besar, juga mengakibatkan membesarnya defisit neraca transaksi berjalan karena kekurangan pasokan energi fosil tersebut dipenuhi dari luar negeri. Selain itu, porsi pengeluaran BBM dalam belanja Rumah tangga relatif besar sehingga dampak *shock* harga energi (minyak) internasional pada perekonomian (terutama melalui inflasi) relatif besar.

Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang besar, namun menghadapi risiko ketahanan energi yang cukup rentan. Terus meningkatnya kebutuhan bahan bakar belum sepenuhnya mampu dipenuhi oleh produksi energi domestik. Beberapa masalah yang menghambat produksi energi domestik terutama adalah kendala pembangunan infrastruktur berupa pengembangan menara dan pembangkit listrik serta terbatasnya pengembangan diversifikasi energi baru dan terbarukan. Di sisi lain, pemanfaatan bahan bakar alternatif, seperti biofuel, belum mampu menggeser ketergantungan yang tinggi pada sumber daya energi fosil. Hal ini perlu diwaspadai, karena disamping berdampak pada semakin langkanya ketersediaan energi fosil, juga berakibat pada kerusakan lingkungan dan pemanasan global. Meskipun Pemerintah telah melakukan reformasi energi antara lain dengan mengurangi subsidi BBM dan penggunaan biofuel, tingginya impor migas dan terbatasnya cadangan minyak Indonesia masih membebani defisit neraca pembayaran.

Penggunaan energi yang terus meningkat juga akan berdampak terhadap pengendalian inflasi. Energi yang digunakan di sektor transportasi hampir keseluruhannya menggunakan BBM. Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan sarana transportasi udara, sehingga pangsa kebutuhan avtur akan terus meningkat. Sektor komersial dan rumah tangga sebagian besar energinya dipenuhi oleh listrik. Untuk sektor komersial penggunaan energinya tidak banyak berubah, sedangkan untuk rumah tangga terdapat pengurangan pangsa kebutuhan LPG. Dengan demikian, jika terjadi perubahan harga pada bahan bakar energi, maka akan berdampak pada peningkatan inflasi dan mengganggu upaya menjaga stabilitas harga.

Beberapa kebijakan dapat ditempuh untuk memperkuat ketahanan energi baru dan terbarukan. Untuk mengurangi ketergantungan energi dari satu sumber energi (fosil), terutama yang berasal dari luar negeri, diperlukan kebijakan untuk (i) mendorong pasokan sumber energi yang semakin beragam: dan (ii) mengurangi permintaan energi oleh pelaku ekonomi. Pembentukan kebijakan energi yang akan ditempuh antara lain berupa pengembangan dan pemanfaatan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, pengelolaan minyak dan gas bumi, pemenuhan ketenagalistrikan, serta peningkatan nilai tambah produk tambang, seperti batu bara.

Kebijakan untuk mendorong pasokan sumber energi yang semakin beragam dilakukan antara lain dengan kebijakan B20 maupun mendorong penggunaan energi baru terbarukan, seperti penggunaan energi panas bumi, sinar matahari, arus air, maupun angin. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, tenaga mikro hidro, dan tenaga biomassa mampu meningkatkan ketersediaan energi dan kapasitas terpasang pembangkit listrik serta meningkatkan rasio elektrifikasi dan bauran energi primer. Pemerintah perlu secara konsisten untuk mencapai penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada 2028. Target tersebut dapat tercapai dengan partisipasi masyarakat dan dukungan Pemerintah dalam pengembangan EBT, terutama PV *rooftop* yang harganya diperkirakan akan semakin menurun di masa depan.

Kebijakan untuk mengurangi permintaan sumber energi antara lain dengan pembangunan infrastruktur dan perbaikan transportasi masal. Dengan semakin baiknya moda transportasi masal diharapkan akan mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga porsi belanja BBM dalam rumah tangga dapat menjadi lebih rendah (3.05% dari IHK berdasarkan tahun dasar 2012). Hal tersebut akan mengurangi dampak *shock* harga minyak dunia terhadap perekonomian. Selain itu, insentif juga perlu diberikan pada kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar non fosil (misal mobil listrik). Selain itu, mengingat kebijakan di bidang energi ini implementasinya memerlukan waktu yang relatif panjang, maka konsistensi kebijakan yang ditempuh Pemerintah menjadi semakin penting. Konsistensi kebijakan akan memudahkan para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk melakukan respons dan memberikan dukungan yang dibutuhkan.

6.2.2. Memperkuat Sektor Unggulan

6.2.2.1. Sektor Industri Pengolahan

Strategi untuk memperkuat sektor industri pengolahan agar bernilai tambah tinggi perlu terus ditingkatkan. Sektor industri memainkan peranan strategis bagi penguatan struktur perekonomian Indonesia dan bisa berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki neraca pembayaran. Pengembangan sektor manufaktur menjadi salah satu kunci agar ekonomi Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi secara berkelanjutan dan dapat bertransformasi menjadi negara maju berpendapatan tinggi sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor.

Upaya mendorong perkembangan sektor industri pengolahan tersebut antara lain dilakukan dengan mendorong peningkatan ekspor sektor tersebut. Dengan meningkatnya ekspor, diharapkan pendapatan sektor tersebut meningkat. Upaya mendorong perkembangan sektor tersebut juga dilakukan dengan menggalakkan substitusi impor. Melalui substitusi impor, permintaan produk manufaktur lokal akan semakin tinggi dan pendapatannya pun akan semakin meningkat. Kedua hal itu akan dapat mendorong perkembangan sektor industri pengolahan lebih lanjut. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan daya saing, yang antara lain dilakukan dengan upaya untuk menurunkan harga listrik dan gas industri. Selama infrastruktur energi belum memproduksi secara optimal dan harga listrik dan gas belum turun, Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan penetapan harga listrik dan gas yang lebih rendah dibandingkan harga pasarnya, khususnya ditujukan untuk industri strategis nasional.

Untuk mencapainya, perlu upaya penguatan manufaktur yang dapat mendukung pengurangan defisit transaksi berjalan secara bertahap (*staging*) dalam jangka pendek hingga menengah-panjang, disertai dengan prioritas pada sejumlah sektor agar berdampak positif terhadap transaksi berjalan. Dalam jangka pendek, untuk memastikan ketahanan eksternal tetap terjaga, perlu ditempuh upaya mengurangi defisit transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor, terutama di sejumlah sektor prioritas sebagai *quickwin*. Dalam jangka menengah-panjang, sektor manufaktur perlu diarahkan untuk dapat mengurangi defisit transaksi berjalan melalui substitusi bahan baku impor dengan melakukan pengembangan di sejumlah industri.

Pentahapan *upgrading* industri di Indonesia dalam jangka pendek sejalan dengan upaya menjaga ketahanan eksternal melalui stabilitas nilai tukar, sektor manufaktur perlu diarahkan untuk dapat berkontribusi dalam penambahan devisa ekspor sebagai *quickwin*. Hal ini dilakukan dengan mendorong sejumlah industri prioritas ekspor yang tidak menimbulkan dampak *J-curve* meski masih berbasis komoditas dan berteknologi menengah-bawah. Dalam jangka menengah, sektor manufaktur perlu diarahkan untuk dapat mensubstitusi bahan baku impor melalui pengembangan sejumlah industri hilir sektor primer, industri bahan baku, dan industri berteknologi menengah. Hal ini diperkuat dengan implementasi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Dalam jangka panjang, pengembangan sektor manufaktur diarahkan untuk dapat mengeksport produk manufaktur berteknologi tinggi sebagai salah satu ciri negara maju yang berpendapatan tinggi.

Prioritisasi pengurangan defisit transaksi berjalan dalam jangka pendek dilakukan pada sektor yang diprioritaskan pada industri atau subindustri yang memiliki surplus neraca perdagangan dan berdaya saing tinggi. Secara rata-rata, kinerja neraca perdagangan 20 komoditas ekspor utama Indonesia pada 2016-2018 sebagian besar surplus. Selanjutnya, pemilihan industri prioritas juga didukung oleh daya saing yang cukup tinggi. Secara umum, daya saing produk manufaktur berteknologi rendah Indonesia cukup baik, sedangkan beberapa produk berteknologi menengah-tinggi berpotensi untuk didorong. Daya saing produk ekspor yang surplus (dan memiliki RCA lebih dari 1 atau RSCA positif) didominasi oleh produk-produk

ekspor tradisional berteknologi rendah, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, makanan dan minuman, serta produk manufaktur berteknologi menengah yang berpotensi untuk didorong, seperti perangkat elektronik dan kendaraan bermotor.

Berdasarkan kriteria tersebut, industri yang dapat menjadi *quickwin* untuk diprioritaskan pengembangan kinerja ekspornya dalam jangka pendek, adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, otomotif, dan industri makanan-minuman, khususnya perikanan dan kopi. Selanjutnya untuk jangka menengah dan panjang akan difokuskan pada industri yang masih membutuhkan waktu yang cukup untuk proses pengembangan karena faktor teknologi dan besarnya investasi. Salah satunya adalah industri elektronik yang berteknologi menengah-tinggi, memiliki nilai tambah tinggi dan dapat didukung oleh industri lokal. Selain itu juga mengembangkan industri kimia dan logam dasar yang memiliki nilai impor terbesar saat ini sehingga strategi substitusi impor tersebut akan sangat membantu memperbaiki defisit transaksi berjalan. Selain itu, pengembangan industri kimia dan logam dasar juga didukung oleh potensi bahan baku domestik.

Dari sisi Pemerintah, Kementerian Perindustrian juga telah memiliki lima sektor berorientasi ekspor yang difokuskan untuk menuju Indonesia 4.0, yaitu sektor makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Selain sektor prioritas industri 4.0, Pemerintah juga telah menentukan sektor atau komoditas unggulan berorientasi ekspor non-industri 4.0, yaitu industri perikanan, permesinan umum, dan lainnya (produk kayu, karet, *furniture*). Pengembangan sektor industri pengolahan dilakukan dengan kebijakan 3P. Kebijakan pertama yakni perbaikan faktor produksi (P1), ditujukan untuk meningkatkan daya saing infrastruktur dan kualitas SDM serta meningkatkan produktivitas. Kebijakan kedua yakni pengaturan dan kelembagaan (P2), ditujukan untuk meningkatkan insentif investasi pada industri pengolahan dan insentif untuk melakukan ekspor. Kebijakan ketiga yakni kerjasama perdagangan dan promosi (P3), ditujukan untuk memperluas negara tujuan ekspor dan jenis produk yang diekspor melalui peningkatan kerjasama perdagangan dan promosi produk ekspor.

6.2.2.2. Sektor Pariwisata

Selain sektor industri, sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor unggulan penghasil devisa negara dengan kebutuhan impor (*import content*) yang relatif kecil, memiliki nilai tambah yang tinggi, dan penggunaan tenaga kerja yang relatif banyak. Pengembangan di sektor pariwisata juga dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih pendek, dibandingkan dengan pengembangan pada sektor industri. Selain itu, dampak *external shock* terhadap sektor pariwisata relatif tidak terlalu besar, apabila dibandingkan dampaknya pada sektor lain yang terkait dengan komoditas. Di tengah persaingan dengan negara *peers* yang semakin ketat dalam pengembangan pariwisata, diperlukan strategi kebijakan ke depan yang lebih terarah untuk terus mendorong sektor pariwisata. Pertumbuhan kunjungan wisman Vietnam dan Malaysia pada Januari-April 2019 tumbuh lebih tinggi dari Indonesia masing-masing 7,6% dan 7,1%. Sementara Thailand tumbuh 1,8%.

Pengembangan sektor pariwisata dilakukan melalui strategi peningkatan aksesibilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, didukung penguatan promosi, dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata (3A2P) guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa dari pariwisata, terutama destinasi wisata prioritas. Secara lebih rinci, langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk penguatan kinerja sektor pariwisata Indonesia, antara lain melalui: (1) Mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; (2) Mendorong pengembangan atraksi wisata, antara lain melalui pengembangan pariwisata di daerah perbatasan (*cross-border tourism*), penyelenggaraan sejumlah kegiatan wisata secara periodik. Pengembangan atraksi wisata juga dapat dilakukan melalui pengembangan atraksi wisata ke arah *quality tourism* dengan menetapkan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) di daerah destinasi wisata; (3) Meningkatkan kualitas amenitas di daerah destinasi wisata, antara lain dengan memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar, termasuk ketersediaan fasilitas anjungan tunai mandiri (ATM), kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA), operasional kanal pembayaran, serta pengembangan elektronifikasi transaksi pelaku pariwisata di destinasi wisata; (4) Memperkuat promosi pariwisata nasional untuk meningkatkan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan mancanegara, antara lain melalui promosi digital (*marketplace*), pengembangan paket wisata, perluasan paket promo wisata (*hot deals*) di destinasi wisata, serta promosi di beberapa lokasi yang menjadi *regional tourism hub*; (5) Mendorong investasi dan pembiayaan dalam pengembangan destinasi wisata, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta perbaikan dukungan data dan informasi; dan (6) Menyusun standar prosedur Manajemen Krisis Kepariwisataan dan membentuk forum Manajemen Krisis Kepariwisataan Daerah (MKK Daerah).

6.2.2.3. Sektor Maritim

Untuk menjadi poros maritim dunia, seyogyanya secara internal Bangsa Indonesia melakukan pembenahan pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Percepatan program pembangunan perikanan misalnya perikanan tangkap terpadu perlu dilakukan melalui kebijakan perikanan yang pro rakyat dan pro lingkungan untuk menuju keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan itu sendiri. Keberlanjutan secara ekonomi dan biologi haruslah seimbang dimana pelaku usaha (nelayan, pengusaha perikanan dan *stakeholder* lainnya yang terlibat) mendapatkan keuntungan maksimum dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya. Konsep sistem manajemen maritim yang berkelanjutan digambarkan dalam Gambar 7.



Gambar 7. Konsep Sistem Manajemen Maritim yang Berkelanjutan

Berikut ini adalah pembenahan-pembenahan yang diperlukan dalam pengelolaan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Pertama, penggunaan kapal buatan dalam negeri perlu didukung oleh galangan kapal penangkap ikan yang memadai. Namun demikian, sebelum galangan kapal dalam negeri tersedia untuk menghasilkan jumlah dan ukuran kapal yang sesuai maka penggunaan kapal buatan luar negeri ini dapat diperbolehkan sampai galangan kapal Indonesia mampu menghasilkan kapal penangkap ikan buatan dalam negeri. Kebijakan moratorium pembelian kapal buatan luar negeri dapat mengurangi jumlah kapal yang pada gilirannya menurunkan produksi perikanan dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan diarahkan untuk memberikan izin kapal penangkapan yang lulus analisis dan evaluasi untuk segera beroperasi perlu pula dilakukan.

Kedua, mengizinkan keberadaan kapal kolektif (alih muat atau *transshipment*) untuk membantu kepentingan pemasaran hasil perikanan baik ekspor maupun dalam negeri. Ketiadaan kapal kolektif dapat digantikan oleh kapal penangkapan ikan yang dilengkapi dengan teknologi pengolahan pasca penangkapan yang baik, misalnya kapal penangkap ikan ber-*freezer* jika ikan dijual dalam bentuk *frozen* atau beku dan teknologi jika ikan diekspor dalam keadaan *fresh* atau segar.

Ketiga, mengingat Indonesia sebagai negara tropis di mana sumberdayanya adalah gabungan atau multispecies, maka peraturan yang dikeluarkan sebaiknya perlu dibuat sesuai dengan karakteristik wilayah atau sumberdaya itu sendiri. Untuk tujuan *sustainability* (keberlanjutan) bukan berarti memberhentikan kegiatan ekonomi melainkan bagaimana mengendalikan kegiatan ekonomi tersebut agar tidak merusak lingkungan maupun sumberdaya ikan itu sendiri.

Keempat, pelarangan terhadap alat tangkap sebaiknya lebih difokuskan pada bagaimana alat tangkap tersebut digunakan serta pengendalian jumlah alat tangkap. Dalam hal operasi di lapangan peran pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pengoperasian alat tangkap. Kelima, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagai bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) perlu lebih disederhanakan dan dioptimalkan. PHP yang terlalu besar dapat mengakibatkan pengusaha berupaya menangkap ikan lebih banyak dan dapat merusak keberlanjutan sumber daya perikanan.

Kelima, selain terkait perikanan, salah satu aspek ekonomi penting lainnya dari kemaritiman adalah terkait garam. Garam konsumsi berbeda dengan garam industri. Saat ini Indonesia belum mampu memproduksi garam sesuai dengan kebutuhan kita sehingga yang terjadi saat ini kita harus impor. Jika kita tidak impor maka akan berdampak pada industri turunan lainnya.

6.2.2.4. Industri Kreatif

Industri kreatif merupakan salah satu sektor unggulan baru yang diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Industri kreatif tersebut didasarkan pada ide dan kreativitas, dimana kreativitas tersebut tidak hanya terkait dengan artistik, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan, rekayasa, inovasi dan teknologi informasi. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2016 industri kreatif menyumbang sekitar 7,4% dari total PDB, dengan nilai ekspor sekitar USD 20 miliar (sekitar 15,1% dari total ekspor nonmigas). Di samping itu, industri kreatif menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja dan terdiri dari 8,2 juta unit usaha yang sebagian besar berupa UMKM. Industri kreatif tersebut pada dasarnya bukan merupakan industri baru, melainkan berupa ketegorisasi dari industri yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan klasifikasi oleh Kementerian Perdagangan, industri kreatif tersebut meliputi kegiatan kreatif terkait dengan periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fesyen, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Yang terbesar pangsaanya adalah: fesyen, kerajinan, dan kuliner.

Indonesia, yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam (flora dan fauna) dan budaya, sangat potensial dalam mengembangkan industri kreatif. Salah satu yang sangat potensial adalah kain batik dan tenun. Kemampuan tinggi seniman batik Indonesia bisa dipadu dengan industri tekstil modern untuk menghasilkan TPT bercita rasa dan berkualitas tinggi. Dengan demikian, nilai tambah yang dihasilkan pun besar dan dapat mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang juga sangat potensial adalah industri kerajinan yang sangat beragam jenisnya. Industri kerajinan tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut. Bekal keahlian membuat barang kerajinan bisa dipadukan dengan teknologi tinggi guna menghasilkan barang kerajinan bernilai seni tinggi dengan kualitas yang juga tinggi. Produksi secara masif akan membuat biaya produksi barang kerajinan tersebut dapat ditekan dan harga jualnya pun menjadi kompetitif.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh industri kreatif. Permasalahan terbesar yang dihadapi berupa: pemasaran dalam negeri yang sulit, riset dan pengembangan yang kurang, edukasi pada para pelaku yang minim, dan keterbatasan infrastruktur fisik. Selain itu, sebagian besar usaha industri kreatif pendanaannya berasal dari modal sendiri akibat terbatasnya usaha yang berbadan hukum. Beberapa program pengembangan industri kreatif yang bisa dilakukan antara lain: (i) mendorong riset-riset yang dapat menghasilkan produk-produk kreatif dan memfasilitasi akses pasar domestik dan internasional, (ii) untuk mengakselerasi pertumbuhan

industri kreatif, berbagai faktor penghambat perlu diatasi, antara lain: hambatan peraturan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia, serta keterbatasan sumber pembiayaan Pemerintah, (iii) mengoptimalkan industri kreatif yang relatif sudah berkembang pesat saat ini, seperti fesyen, periklanan, dan musik, dengan mendorong ekspansi pasar ke luar negeri, serta melakukan penguatan pada industri kreatif potensial yang belum berkembang, dan (iv) industri kuliner halal dan fesyen muslim perlu didorong untuk menembus pasar ekspor ke negara-negara mayoritas muslim dan negara dengan pertumbuhan penduduk muslim yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, Pangestu (2019) menyebutkan adanya tujuh isu strategis dalam pengembangan industri kreatif tersebut, yakni sebagai berikut :

1. *Human resources and capital*

Saat ini pelaku industri kreatif pada umumnya memiliki pendidikan yang relatif rendah. Kreativitas pada umumnya diperoleh dari lingkungan sekitar dan bukan dari bangku pendidikan. Berbekal kreativitas saja tidaklah cukup. Agar industri kreatif tersebut berkembang, para pelaku industri kreatif perlu dibekali dengan ketrampilan untuk memproduksinya dalam jumlah besar, termasuk manajemen operasionalnya. Para pelaku perlu disadarkan pentingnya standardisasi produk, pentingnya SDA yang *renewable*, serta *production network*. Berbekal pengetahuan dan ketrampilan tersebut, diharapkan pelaku induiti kreatif akan dapat meningkatkan skala usahanya.

2. *Creative resources*

Sumber daya yang diperlukan bagi industri kreatif saat ini sebagian besar berasal dari alam dan dari budaya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya perlu diperhatikan daya dukung dan keberlangsungannya. Hal tersebut perlu ditanamkan pada para pelaku industri kreatif. Upaya untuk menjaga keberlangsungan sumber daya alam perlu dilakukan bersamaan dengan pengembangan industri kreatif tersebut. Sementara itu, sumber daya dari sisi budaya secara perlahan terus berkurang seiring dengan beralihnya masyarakat ke budaya nasional dan global.

3. *Growing industry and business*

Industri kreatif diharapkan dapat menjadi industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor-faktor yang diperlukan bagi keberhasilannya, antara lain: perlunya pengembangan *entrepreneurship* di bidang industri kreatif (*creativepreneurship*), upaya-upaya yang diperlukan untuk mengem-bangkannya, dan perlunya menghasilkan produk industri kreatif yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan pembinaan yang terus menerus oleh Pemerintah kepada para pelaku industri kreatif, serta perlu keterlibatan usaha skala menengah dan besar untuk turut membinanya, terutama dalam rangka menghasilkan produk berkualitas dan terstandar secara efisien.

4. *Financing*

Dukungan pembiayaan juga sangat diperlukan guna mendorong perkembangan industri kreatif tersebut. Sumber-sumber pembiayaan antara lain bisa dari kredit program (yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah), perbankan, penyertaan saham dan sumber lainnya. Kemudian, mengingat sebagian besar pelaku industri kreatif adalah UMKM, maka perlu adanya kemudahan atas akses sumber-sumber pembiayaan tersebut, termasuk pula dengan biaya yang terjangkau.

5. *Access to markets and networks*

Pemasaran produk-produk industri kreatif tersebut juga tidaklah mudah. Produk-produk tersebut bernilai tinggi bagi pembeli yang tepat, sedangkan bagi pembeli lain mungkin dianggap biasa saja. Akses ke pasar yang spesifik memerlukan strategi pemasaran yang tepat. Pemerintah dan pengusaha menengah dan besar harus turut memfasilitasi dan membantu para pelaku industri kreatif dalam memasarkan produknya, termasuk membangun jaringan pemasaran (*networks*) untuk keberlanjutannya.

6. *Supporting infrastructure and technology*

Perkembangan industri kreatif perlu didukung dengan ketersediaan infrastruktur dan teknologi yang maju. Mengingat pelaku industri kreatif sebagian besar adalah UMKM yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, maka infrastruktur tersebut pun harus bisa menjangkaunya. Sejauh ini, kebanyakan industri kreatif menggunakan teknologi yang sederhana. Banyak produk yang dibuat secara tradisional dengan alat seadanya. Namun, jika ingin berkembang dengan baik, perlu digunakan mesin dan alat-alat industri yang maju agar produk yang dihasilkan lebih baik kualitasnya dan lebih terstandardisasi.

7. *Institutions*

Faktor yang tidak kalah pentingnya bagi perkembangan industri kreatif adalah faktor institusi atau kelembagaan. Pelaku industri kreatif yang sebagian besar adalah UMKM perlu diberikan kemudahan dalam pengurusan berbagai perizinan. Para pelaku industri kreatif tersebut juga perlu dinaungi oleh perusahaan menengah atau pun besar dalam suatu pola kemitraan. Hasil karya para pelaku industri kreatif tersebut juga perlu dilindungi (bisa dipatenkan) agar tidak begitu saja ditiru. Dengan demikian diharapkan ada insentif yang cukup besar untuk terus mengembangkan industri kreatif tersebut.

6.3. Memperkuat Peran UMKM

Pengembangan UMKM dapat dilakukan antara lain dengan mendorong pola kemitraan antara UMKM dan perusahaan besar. UMKM secara sendiri-sendiri sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Terlebih lagi, dengan semakin terintegrasi dan terbukanya perdagangan dunia dan di era digital, pesaingnya bukan hanya pengusaha lokal, tapi perusahaan multinational yang memiliki skala usaha yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya untuk mengkoordinasikan gerak langkah UMKM perlu ditingkatkan, antara lain dengan menjadikan UMKM tersebut sebagai bagian dari usaha yang besar. Melalui pola kemitraan, UMKM dapat dibina agar hasil produksinya memenuhi standar kualitas, misalnya SNI. UMKM juga bisa digabungkan menjadi unit usaha yang lebih besar sehingga produksinya menjadi lebih efisien dengan adanya *economies of scale*.

Upaya lainnya yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah dengan membantu *business matching* atau mempertemukan UMKM (termasuk koperasi) dengan pihak perbankan, pihak *ecommerce* (antara lain dengan mendorong untuk masuk ke *marketplace*), dan pihak agregator atau eksportir. Untuk itu, Pemerintah diharapkan bisa menerbitkan ketentuan terkait peningkatan akses dan perluasan skema pemodalannya UMKM, kemitraan antara usaha besar dan UMKM, serta insentif pajak yang kondusif bagi UMKM. Mengingat banyaknya jumlah UMKM, sedangkan kemampuan anggaran Pemerintah terbatas, upaya pengembangan UMKM tidak bisa hanya menyandarkan pada Pemerintah. Peran swasta, khususnya perusahaan-perusahaan besar, perlu ditingkatkan.

Dalam proses pembangunan hendaknya juga diperhatikan aspek pemerataan, misalnya dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterbatasan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Upaya yang bisa ditempuh antara lain berupa kebijakan untuk menggunakan tenaga kerja lokal (penduduk setempat) untuk bidang yang sifatnya non strategis dan kebijakan untuk memberdayakan masyarakat yang berpendidikan atau ketrampilan rendah.

Secara spesifik, beberapa usulan program jangka pendek untuk pengembangan dan penguatan UMKM adalah sebagai berikut: (1) Perubahan UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM, khususnya terkait kriteria UMKM dalam rangka penyusunan data base UMKM Nasional sebagai rujukan penyusunan kebijakan, program dan anggaran; (2) Penerbitan Inpres tentang Peningkatan Akses dan Perluasan Skema Permodalan KUMKM yang Mudah dan Murah dengan Tenor Jangka Panjang dari Sumber APBN; (3) Penerbitan Inpres Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM terkait *Business Linkage*; (4) Kebijakan intensif pajak yang kondusif bagi KUMKM; (5) komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui dukungan program dan anggaran yang dituangkan dalam RPJMN, RENSTRA, dan RENSTRADA.

Sementara itu, program-program yang diperlukan dalam jangka menengah-panjang antara lain adalah: (1) Membangun data base KUMKM nasional dengan kriteria yang disepakati secara nasional sebagai rujukan program dan kebijakan; (2) Menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan

Kawasan Bisnis KUMKM Terpadu dengan obyek wisata baik alam, edukasi, sejarah, atau rohani; (3) Melindungi dan Mendorong KUMKM memproduksi produk substitusi impor; (4) Membuat kebijakan dan insentif yang kondusif bagi KUMKM berorientasi ekspor atau pengguna bahan baku lokal; (5) Membentuk Tempat Pelayanan Perijinan KUMKM Satu Pintu (TPSP) di setiap Kabupaten/Kota; (6) Membentuk dan memperkuat Galeri Produk KUMKM dan Lembaga Ekspor dan Impor Produk KUMKM di setiap Provinsi; (7) Membentuk Kementerian Kewirausahaan RI, sehingga siklus kewirausahaan dalam kontribusinya pada perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik dari mulai bertumbuh, menjadi kuat, dewasa, dan matang sebagai UMKM; (8) melakukan perubahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM RI menjadi Kementerian Koperasi RI, sehingga fokus pembangunan di bidang Koperasi saja.

6.4. Memperluas Pemberdayaan Ekonomi Syariah

Ekonomi dan keuangan syariah dalam dekade terakhir telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, baik di tataran global dan domestik. *The State of Global Islamic Report* (SGIR) menyebutkan bahwa pengeluaran makanan halal dan gaya hidup halal (*Halal Lifestyle*) dunia mencapai USD 2,1 triliun (2018) dan masih akan tumbuh sehingga diperkirakan tahun 2023 mencapai USD 3 triliun. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan populasi Muslim yang semakin meningkat. Indonesia saat ini masih menghadapi gap antara permintaan produk/jasa halal dengan penyedia produk/jasa halal, sehingga posisi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di Dunia masih sebagai “market produk/jasa halal dunia”. Posisi Indonesia di Ekonomi dan keuangan Global, masih di peringkat 10 sebagai negara produsen produk / jasa halal.

Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap produk/jasa halal maka kebijakan pengembangan Industri Halal di Indonesia perlu terus diperkuat sehingga permintaan produk/jasa halal dapat dipenuhi dari produksi halal dalam negeri. Selama dekade terakhir Indonesia masih berfokus kepada pengembangan keuangan syariah (terutama bank, non bank, sukuk), hal ini sejalan dengan tersusunnya Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI) Tahun 2016 yang lalu dan terbentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang diketuai Presiden RI. Sementara untuk pengembangan ekonomi syariah terutama Industri Halal (makanan & minuman, pariwisata, fesyen, media dan rekreasi, farmasi & kosmetik, energi terbarukan) masih belum dilakukan. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) baru diluncurkan Pemerintah pada 14 Mei 2019 di Jakarta oleh Presiden RI.

Dengan adanya MEKSI dan KNKS diharapkan ada acuan formal dari Pemerintah bersama-sama dengan pelaku usaha syariah dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan lebih detail program kerja pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Dengan adanya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) yang diluncurkan 14 Mei 2019 dan sudah terbentuknya manajemen eksekutif KNKS, maka pendetailan program dan koordinasi antar lembaga, pelaku dan *stakeholder* lainnya dapat dilaksanakan. Monitoring program oleh Ketua Dewan Pengarah KNKS (Presiden RI) perlu

dilaksanakan secara rutin (6 bulan sekali) dan apabila diperlukan detail program MEKSI dapat dituangkan dalam bentuk Keppres agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan oleh lembaga Pemerintah dan *stakeholder* lainnya.

Beberapa area yang perlu menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah sesuai dengan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia adalah:

- a. Mendorong tumbuhnya usaha syariah di Indonesia melalui penerapan “Rantai Nilai Halal” (Halal Value Chains), agar terjalannya usaha kemitraan usaha antar UMKM, antara UMKM dan Korporasi dan antar Korporasi baik skala nasional maupun global.
- b. Pengembangan produk keuangan syariah (komersial maupun sosial), yang memiliki nilai lebih dibandingkan dengan produk konvensional dengan karakteristiknya bagi hasil (profit and loss sharing) dan sindikasi.
- c. Riset, Edukasi dan Komunikasi untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia yang masih rendah (diperkirakan masih dibawah 10%).

Berikut ini adalah program jangka pendek yang perlu dilakukan untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah. Pertama, mengembangkan usaha syariah melalui *piloting* berbagai *project* pengembangan usaha syariah di berbagai sektor usaha yang lebih inklusif seperti pemberdayaan ekonomi pesantren di berbagai daerah, pengembangan UMKM terutama untuk ekonomi kreatif kerajinan dan makanan khas, program kemitraan antara UMKM/Ponpes dengan korporasi terutama untuk komoditi ekspor. Kedua, meningkatkan produk/instrumen perbankan syariah di Indonesia agar setara dengan berbagai produk/ inovasi di bank konvensional (NCD syariah, *Hedging* Syariah, Repo Syariah, *Digital banking* dan *payment* di bank syariah dll). Ketiga, mendorong meningkatnya sukuk korporasi bagi pembiayaan ekonomi yang lebih jangka panjang, serta gerakan wakaf produktif, baik *cash* wakaf maupun asset wakaf sebagai alternatif pembiayaan ekonomi di berbagai daerah, termasuk gerakan wakaf profesi. Keempat, melakukan kegiatan edukasi dan komunikasi secara komprehensif sekaligus sebagai etalase untuk *showcase* berbagai jenis usaha atau produk yang dihasilkan dari pengembangan eksyar di Indonesia (Festival Ekonomi Syariah, baik di level regional, nasional maupun internasional) dan kolaborasi dari berbagai *stakeholder* di Indonesia.

Dalam jangka menengah-panjang, kebijakan perlu diarahkan untuk membentuk ekosistem industri halal di Indonesia yang melibatkan regulasi, pelaku usaha baik UMKM dan Korporasi yang berbasis produksi produk halal serta lembaga keuangan syariah di suatu Kawasan Industri Khusus (*Halal Valley*). Untuk itu, perlu juga dibangun etalase-etalase produk halal di Indonesia melalui “Halal Park” di kota-kota besar di Indonesia serta tersedianya *market place digital* untuk produk-produk halal. Selain itu, diperlukan juga pembangunan infrastruktur yang mendukung pembangunan produk halal, antara lain pelabuhan produk halal, logistik, pelayanan sertifikasi halal dan pusat informasi *value chains*. Dari sisi keuangan, diperlukan lembaga keuangan yang kuat sehingga mampu melakukan pembiayaan dan pelayanan keuangan syariah skala nasional dan global. Di samping itu, perlu juga diperkuat lembaga pengelola wakaf produktif yang

memiliki kompetensi dan manajemen dalam pembiayaan proyek-proyek industri halal di Indonesia. *Islamic Social Finance* (ISF) dapat menjadi salah satu solusi yang efektif dan nyata dalam mendukung program ekonomi nasional. ISF berperan serta membantu Pemerintah dalam meningkatkan layanan sosial masyarakat, menurunkan biaya perekonomian, serta mendukung distribusi pendapatan dan pertumbuhan yang inklusif. Optimalisasi ISF dilakukan melalui inovasi pengelolaan ZISWAF, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan tata kelola, serta kerjasama dengan otoritas terkait.

6.5. Meningkatkan Sumber Pembiayaan

Untuk mengatasi keterbatasan dalam pembiayaan pembangunan, salah satu yang dapat ditempuh adalah melalui pendalaman pasar keuangan. Pendalaman pasar keuangan di antaranya dilakukan melalui peningkatan variasi instrumen dan perluasan basis investor. Pendalaman pasar keuangan juga perlu diperkuat dengan penguatan *Financial Market Infrastructure* (FMI). Koordinasi dalam akselerasi pendalaman pasar keuangan perlu diperkuat, terutama melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK). Dalam kaitan ini, beberapa inisiatif pengayaan instrumen keuangan yakni melalui penerbitan obligasi daerah dan penciptaan instrumen untuk menangkap potensi dari program *tax amnesty*.

6.5.1. Penerbitan Obligasi Daerah

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di daerah yang potensial untuk dikembangkan adalah Obligasi Daerah. Pilihan untuk mengembangkan Obligasi Daerah dilandasi oleh kecilnya anggaran pembangunan di daerah dan trend Belanja Modal dalam APBD yang kurang mendukung pembangunan dan penyediaan infrastruktur yang menunjang pembangunan ekonomi. Di sisi lain, Pinjaman Daerah di beberapa negara sudah menjadi trend sumber pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur, misalnya di Jepang, Cina, Vietnam dan Polandia. Di samping pembiayaan secara langsung melalui Obligasi Daerah, Pemerintah daerah juga bisa melakukan pembiayaan secara tidak langsung, misalnya melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menerbitkan Saham, Obligasi, dan Sukuk. Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 13 BUMD yang telah melakukan penggalangan dan melalui pasar modal, dengan outstanding obligasi BUMD adalah Rp12,08 Triliun.

Dua hal penting yang dapat mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur melalui obligasi daerah adalah jangka waktu pendanaan yang bersifat jangka panjang sehingga cocok bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur. Hal berikutnya adalah aspek hukum, dimana sudah terdapat ketentuan baik berupa Undang-undang maupun Peraturan Pemerintah yang dapat digunakan sebagai dasar hukum penerbitan obligasi daerah. Saat ini perangkat hukum terkait obligasi daerah sudah cukup lengkap, terdiri dari: (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015; (5) Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pinjaman Daerah; (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah; dan (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Untuk ketentuan terkait penyampaian pernyataan pendaftaran di Pasar Modal, ketentuan yang mengatur juga sudah sangat lengkap, antara lain: (1) POJK No. 61/POJK.03/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Suku Daerah; (2) POJK No. 62/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan (3) POJK NO.63/POJK.04/2017 tentang Laporan dan Pengumuman Emiten Penerbit Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada Obligasi Daerah yang dapat direalisasikan. Kendala mendasar adalah kurangnya pemahaman para kepala daerah (Pemprov dan Pemkab) dan DPRD (Tk I atau Tk II) terhadap manfaat dan prosedur penerbitan obligasi daerah. Perbedaan persepsi antara pemangku kepentingan terkait penggunaan pinjaman daerah atau memaksimalkan penggunaan anggaran (termasuk SILPA) untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Selain itu, adanya 'keengganan' dari para kepala daerah dan DPRD untuk menerbitkan obligasi daerah dalam jangka waktu yang lama lebih dari 5 tahun, atau melebihi masa jabatan mereka. Hal ini menimbulkan kekhawatiran dari kepala daerah dan DPRD bahwa mereka akan meninggalkan PR bagi kepala daerah dan DPR yang baru serta berpotensi menjadi risiko hukum di masa mendatang.

Tingginya tingkat bunga yang diharapkan oleh calon investor juga membuat Obligasi Daerah menjadi instrument yang kurang menarik bagi para kepala daerah dan DPRD. Sebagai perbandingan, Pemerintah menerbitkan instrument Surat Utang Negara (SUN) ritel kepada investor individu secara online (e-SBN) dengan tingkat kupon mengambang yaitu *Savings Bond Ritel* (SBR) seri SBR007, dengan suku bunga mengambang dengan tingkat kupon minimal (*floating with floor*) sebesar 7,50% dan tingkat kupon minimal tersebut tidak berubah sampai dengan jatuh tempo.

Kendala dari sisi kelembagaan antara lain belum adanya Unit Pengelola Obligasi Daerah (Debt Management Unit – DMU) di dalam struktur pemerintahan. Unit Pengelola Obligasi Daerah adalah unit yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memastikan pengelolaan pendapatan dan barang milik daerah yang dibiayai oleh Pinjaman Daerah dilakukan secara professional untuk menjamin pembayaran kewajiban yang terkait dengan Pinjaman. DMU tidak harus berdiri sebagai unit yang terpisah, selama fungsi-fungsi yang harus dijalankannya (*front office, middle office, back office*) bisa dilekatkan kepada unit/SKPD yang sudah ada. PMK Nomor

180/ PMK.07/2015 mengharuskan adanya keterangan mengenai struktur, perangkat kerja dan sumber daya manusia Unit Pengelola Obligasi Daerah tetapi tidak mengharuskan dibentuknya unit tersendiri untuk melakukan fungsi pengelolaan Obligasi Daerah. Salah satu kendala pembentukan Unit Pengelola Obligasi Daerah adalah ketersediaan sumber daya manusia di daerah.

Untuk mengatasi berbagai isu yang muncul tersebut diperlukan kebijakan jangka pendek serta kebijakan jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek perlu upaya edukasi secara berkesinambungan kepada para kepala daerah (Pemprov dan Pemkab) dan DPRD (Tk I atau Tk II) tentang manfaat Obligasi Daerah antara lain untuk pembiayaan sektor-sektor prioritas, yaitu Pelayanan Air Minum, Penanganan Limbah dan Persampahan, Transportasi, Rumah Sakit, Pasar Tradisional dan Tempat Perbelanjaan, Wilayah Wisata dan Pelestarian Alam, Terminal dan Subterminal, Perumahan dan Rumah Susun, dan Pelabuhan Lokal dan Regional.

Sementara itu, dalam jangka panjang, Obligasi Daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, keberadaan Obligasi Daerah dapat meningkatkan tata kelola daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, serta memberikan peran aktif bagi masyarakat untuk pengawasan dan pembangunan daerah. Selain itu, dalam jangka menengah-panjang Obligasi Daerah bisa menjadi salah satu instrumen yang menarik dalam rangka mengurangi potensi *reversal* dana repatriasi. Obligasi daerah juga dapat ditawarkan kepada investor dari luar negeri untuk mencegah *crowding out*. Selain itu, perlu dikaji pengembangan sukuk daerah sebagai alternatif investasi bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau pengembangan kawasan wisata syariah.

Salah satu risiko penerbitan Obligasi daerah adalah adanya perubahan *political will* dari Kepala Daerah dan DPRD. Perlu ada penegasan dari Kepala Daerah dan DPRD bahwa Obligasi Daerah tersebut dijamin oleh Pemerintah Daerah. Salah satu penyebab sulitnya proses penerbitan Obligasi Daerah dan proses persetujuan penerbitan Obligasi Daerah dari DPRD adalah proses pembangunan infrastruktur yang membutuhkan waktu panjang. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada para kepala daerah dan DPRD. Selain itu, edukasi atau *Focus Group Discussion* kepada para aparat penegak hukum termasuk BPK, BPKP, Kejaksaan Agung, MA dan aparat penegak lainnya juga diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan obligasi daerah yang umumnya berjangka waktu lebih dari 5 tahun aman secara hukum. Harapannya, para kepala daerah dan DPRD memiliki keyakinan rendahnya risiko hukum atas penerbitan obligasi daerah.

6.5.2. Pengayaan Instrumen untuk Menangkap Potensi Dana *Tax Amnesty*

Sesuai dengan Undang-undang Pengampunan Pajak, *periode holding period* dana repatriasi Tahap I mulai berakhir pada bulan Juli 2019. Oleh karena itu, perlu inisiatif lanjutan supaya dana tersebut tetap bertahan diinvestasikan di Indonesia. Berdasarkan data dari Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), mayoritas

dana repatriasi yang masuk melalui *gateway* perbankan adalah dalam mata uang valas sebesar Rp 105 Triliun (85%), dan dalam mata uang IDR sebesar Rp 19 Triliun (15%). Sebagian besar valas tersebut dilakukan dalam mata uang USD sebesar Rp 94 Triliun. Selanjutnya, FK-PPPK juga telah melakukan survei kepada 6 bank besar yang mencakup Rp50,77 Triliun atau 39,4% terhadap total dana repatriasi sebesar Rp 129 Triliun. Hasil survei menunjukkan bahwa Rp 38,7 Triliun (76%) dana repatriasi ditempatkan pada aset likuid dan Rp 12,1 Triliun (24%) ditempatkan pada aset nonlikuid.

FK-PPPK menyebutkan bahwa kelompok aset yang paling berpotensi mengalami reversal adalah produk keuangan yang relatif likuid, yaitu deposito, saham, obligasi, dan reksadana. Sementara itu, produk keuangan seperti RDPT, reksadana terproteksi dan KPD dikategorikan tidak likuid, sehingga tidak menjadi potensi *reversal*. Paling tidak terdapat 2 dampak reversal dana repatriasi tersebut, baik dana repatriasi dalam bentuk valas maupun IDR, yaitu dampak terhadap fungsi intermediasi perbankan dan dampak terhadap pasar keuangan.

Dengan dasar tersebut, FK-PPPK melakukan simulasi perhitungan potensi reversal Dana Repatriasi. Secara umum, FK-PPPK menyebutkan bahwa potensi reversal dana repatriasi relatif kecil. Melihat kondisi likuiditas pasar keuangan saat ini, potensi reversal tersebut masih dapat diserap dengan baik, baik oleh pasar uang maupun pasar valas domestik.

Penambahan outlet produk investasi dalam valas diperlukan sebagai alternatif penempatan dana repatriasi dalam valas, mengingat mayoritas dana repatriasi dilakukan dalam mata uang valas. Produk investasi ini harus kompetitif secara global. Selain itu perlu dilakukan revisi atas POJK Nomor 37/POJK.04/2014 Tentang Reksa Dana Penyertaan Terbatas. *Key point* Revisi POJK RDPT, diantaranya terkait dengan penggunaan mata uang asing maupun Rupiah dalam investasi RDPT, memiliki nilai minimum investasi sebesar Rp 1 miliar per investor, bersifat tertutup dan memiliki *holding period*, dapat berinvestasi pada Efek Bersifat Utang Penawaran Umum atau pun Non Penawaran Umum, dan Efek Bersifat Ekuitas perusahaan tertutup, dan dapat berinvestasi pada instrumen hedging mata uang.

Kebijakan perpajakan yang spesifik menahan dana repatriasi TA belum tersedia, misalnya berupa *tax rate* yang lebih kompetitif dibandingkan tarif pajak di luar negeri. Sedangkan untuk menarik aliran dana masuk dalam bentuk FDI secara umum dibutuhkan insentif perpajakan terkait *tax holiday* (Perluasan sektor, penyederhanaan proses melalui OSS, skema mini *tax holiday*) dan *tax allowance* (pengurangan dalam penghasilan neto, penyusutan dipercepat, perpanjangan kompensasi kerugian).

6.5.3. Penguatan Peran Lembaga Pembiayaan dan Sektor Keuangan

Paling tidak terdapat dua isu utama dalam pembiayaan lembaga keuangan. Isu pertama adalah masih adanya perbedaan pemahaman pembebasan pemotongan pajak (PPH 23) pada pendapatan kegiatan pembiayaan pada Perusahaan Pembiayaan. Isu lainnya adalah masih terdapat perbedaan pemahaman pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada penjualan barang jaminan pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan. Meskipun demikian, secara prinsip pada dasarnya tidak terdapat perbedaan kegiatan usaha yang diatur dengan peraturan Kementerian Keuangan dalam hal ini adalah PMK no. 84/PMK.012/2006 yaitu Anjak Piutang, Sewa Guna Usaha, Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen dengan kegiatan pembiayaan dilakukan pada POJK no. 29/POJK.05/2014 dan POJK no. 35/ POJK.05/2018 yaitu Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.

Untuk mengatasi kedua isu tersebut di atas, perlu penerbitan surat edaran atau penjelasan dari kantor pajak bahwa kegiatan perusahaan pembiayaan pada POJK No.35/POJK.05/2018 diperlakukan sama dengan PMK No.84/PMK.012/2016. Sementara itu, terkait perbedaan pemahaman terhadap PPN, diperlukan penerbitan surat edaran atau penjelasan dari kantor pajak bahwa penjualan aset jaminan pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan bukan merupakan objek PPN.

Dalam kaitan dengan upaya peningkatan peran sektor keuangan, beberapa kebijakan dapat ditempuh. Peran tersebut ialah tentang upaya meningkatkan investor lokal sehingga dapat menjadi penyangga yang kuat pada saat terjadinya perubahan persepsi investor asing dan sekaligus dapat memperdalam sektor keuangan kita. Salah satu potensi investor lokal adalah generasi millennial. Di sini tantangannya adalah bagaimana mendorong mereka untuk berinvestasi di sektor keuangan. Tantangan lainnya adalah bagaimana menarik dana orang Indonesia di luar negeri dan juga bagaimana membuat dana asing bertahan lebih lama di domestik. Dalam hal ini salah satu tantangan yang mengemuka adalah bagaimana meningkatkan suplai valas di pasar domestik, khususnya yang berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga merupakan tantangan tersendiri. Di beberapa negara, seperti Malaysia, Thailand dan India telah mewajibkan para eksportir untuk membawa kembali DHE dan bahkan diwajibkan untuk menukarkan ke mata uang lokal dalam periode tertentu.

Beberapa langkah kebijakan jangka pendek yang perlu dilakukan antara lain: (1) melakukan *profiling* investor baik dari institusi maupun individual terutama yang berasal dari *high net wort* income (termasuk mereka yang telah mengikuti program Tax Amnesty); (2) menciptakan instrumen investasi baru – structured product – yang customize sesuai dengan preferensi investor baik size maupun skema (retail – installment product); (3) mengoptimalkan pendanaan melalui pasar modal untuk BUMN yang memiliki kapasitas besar seperti PLN dan Pertamina melalui structured product dibandingkan dengan pinjaman perbankan (4) memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk menggaet investor millennial. Hasil lelang SBN retail yang lalu terdapat fakta yang menarik bahwa dari 75%

investor baru, ternyata 45% nya adalah generasi millennial; dan (5) memberikan relaksasi regulasi dan insentif untuk mendorong offshore investment dari non resident Indonesia yang berada di luar negeri dan investor asing.

Kebijakan jangka menengah-panjang yang dapat diambil, antara lain: (1) Memperkuat kelembagaan dan kapasitas IKNB (industri keuangan non-bank) untuk masuk di pasar modal – perubahan struktural; (2) Memperbaiki regulasi dan memberi insentif untuk lembaga keuangan non-bank (asuransi dan dapen) untuk masuk ke pasar modal; dan (3) Meningkatkan literasi keuangan bagi investor retail yang belum tersentuh produk investasi keuangan – *Financial Deepening*. Berbagai risiko yang mungkin muncul tentu saja perlu dimitigasi. Sebagai contoh, pengaturan terkait dengan devisa hasil ekspor (DHE) yang harus ditempatkan di pasar keuangan domestik dapat menimbulkan persepsi bahwa Pemerintah memberlakukan *capital control*. Untuk itu perlu dipastikan bahwa DHE yang ditempatkan di domestik harus dapat diperoleh dengan mudah untuk membiayai impornya.

6.5.4. Penguatan Peran Pembiayaan UMKM

Pembiayaan untuk UMKM dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan digital dengan integrasi data kependudukan untuk mempermudah pengumpulan data informasi untuk kepentingan verifikasi. Dengan menggunakan digital, proses pendaftaran menjadi lebih mudah sehingga pengisian data pendaftaran dapat dilakukan bertahap, tidak harus seluruhnya dilakukan di awal untuk mempermudah pendaftaran. Penggunaan digital juga mempermudah koneksi antara Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan para pelaku jasa keuangan.

Diperbolehkan adanya *Escrow Account* bagi Fintech dapat meningkatkan peran Bank Kustodian, yang melakukan penyimpanan dana maupun efek yang sesuai dengan ketentuan. Tetapi dengan banyaknya transaksi, tentu akan sulit bagi Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan melakukan rekonsiliasi penerimaan maupun pencairan dana. Dalam hal ini peran administrasi tersebut dapat dibantu oleh Fintech melalui sistem pembayaran yang dibangun berbasis *Escrow Account*.

Kebijakan lain yang dapat diambil adalah mengubah skema biaya transfer pada nilai tertentu misalnya transaksi dibawah Rp10 juta. Biaya transfer pada transaksi mikro dapat menggunakan persentase, tidak dengan nilai *fixed*. Pembangunan sentral informasi data keuangan juga dibutuhkan agar dapat melengkapi Dukcapil yang merupakan sentral informasi data kependudukan. Informasi ini dapat digunakan pelaku keuangan untuk proses verifikasi (seperti verifikasi rekening). Lembaga ini juga akan membantu bagi perlindungan masyarakat, karena masyarakat dapat melakukan pengecekan atas aset keuangan yang dimilikinya.

Peningkatan peran pembiayaan UMKM juga dapat ditempuh berkaitan dengan memperkuat penetrasi uang elektronik di kelompok UMKM. Masih terbatasnya penetrasi perbankan mengakibatkan sebagian besar pelaku UMKM dan masyarakat menengah ke bawah tidak memiliki rekening bank.

Hal ini menyebabkan lambatnya laju inklusi keuangan karena UMKM tidak dapat mendaftarkan diri sebagai merchant uang elektronik, yang mensyaratkan perlunya rekening bank. Terbatasnya limit transaksi bulanan yang paling banyak hanya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) mengurangi minat pelaku UMKM untuk menggunakan uang elektronik dalam berbisnis.

Pemerintah dapat melakukan piloting antara penyelenggara UE dan UMKM di mana UMKM terdaftar tidak perlu memiliki rekening bank. Penyelenggara UE juga diharuskan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang baik untuk tetap menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Sementara ini pemerintah dapat melakukan piloting bagi pengguna UE *high-frequency* di mana atas pengguna-pengguna ini sudah dilakukan *due diligence* yang memadai sehingga menaikkan batas limit UE dapat diimplementasikan secara bertanggung jawab. Agar otoritas pengawas lembaga keuangan memberikan rekomendasi koneksi dengan Dukcapil sesuai kebutuhan industri. Sementara ini dapat dilakukan *piloting* bagi pelaku perbankan dan penyelenggara UE agar dapat merekrut agen LKD dengan lebih leluasa di mana diikuti dengan pembelajaran atas manajemen risiko, risiko kejahatan keuangan termasuk di antaranya tindakan pencucian uang. Hasil *piloting* dapat dijadikan rekomendasi bagi peninjauan peraturan lebih lanjut.

Pemerintah perlu meninjau ulang regulasi yang ada terkait UMKM yang mendaftar sebagai merchant UE agar tidak diharuskan terhubung dengan akun bank. Pemerintah juga perlu meninjau ulang regulasi terkait batas transaksi UE agar disesuaikan ke kebutuhan masyarakat; dari Rp20 juta per bulan menjadi Rp100 juta per bulan, serta untuk peningkatan batas simpanan UE dari Rp10 juta untuk registered menjadi Rp50 juta. Persyaratan koneksi ke Dukcapil harus tegas, jelas dan menyesuaikan dengan kebutuhan industri diikuti dengan akuntabilitas institusi. Pemerintah perlu melonggarkan regulasi seputar penyelenggaraan LKD individu untuk mempercepat penetrasi inklusi keuangan.

7. PENUTUP

Paper ini menguraikan berbagai upaya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju dan inklusif. *Paper* mengusulkan tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya memperkuat model pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kualitas faktor produksi melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta penguatan kelembagaan. Kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dengan mempertajam strategi kebijakan meliputi lima kebijakan penting, yakni: (i) pengelolaan kebijakan makroekonomi yang disiplin dan sehat, (ii) kebijakan sektor unggulan, (iii) kebijakan untuk memperkuat UMKM, (iv) kebijakan pemberdayaan ekonomi syariah, dan (v) memperkuat sumber pembiayaan guna menopang berbagai kebijakan yang akan ditempuh. Usulan strategi kebijakan yang disampaikan secara umum sejalan dengan lima fokus kebijakan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 sebagaimana disampaikan Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Lima fokus kebijakan tersebut meliputi pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi serta birokrasi, dan melakukan transformasi ekonomi.

Berbagai strategi kebijakan yang diuraikan dalam *white paper* ini pada akhirnya tetap perlu dipadupadankan sehingga menjadi satu bauran kebijakan yang terintegrasi secara optimal. Integrasi kebijakan bermakna bahwa bauran kebijakan yang ditempuh tidak hanya berhubungan dengan kebijakan makroekonomi fiskal, moneter, dan struktural, tetapi juga kebijakan sektoral. Bauran kebijakan sektoral ini tidak hanya berhubungan dengan kebijakan yang bersifat horisontal intrasektor, tetapi juga kebijakan vertikal antar sektor yang saling berhubungan dan mendukung, serta bauran kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini, tidak ada pilihan lain bahwa sinergi kebijakan antar pemangku kebijakan perlu terus diperkuat sehingga berbagai kebijakan yang ditempuh dapat berjalan harmonis menuju tujuan menjadikan Indonesia yang maju dan inklusif.

Terakhir, implementasi strategi kebijakan yang ditempuh tersebut tetap perlu mempertimbangkan aspek gradualisme. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan tetap berjalan seimbang dan tidak memberikan tekanan berlebihan kepada perekonomian dalam jangka pendek. Industrialisasi, misalnya, dilakukan dengan tetap menjaga eksistensi sektor-sektor usaha lainnya, khususnya sektor pertanian. Upaya melepaskan diri dari ketergantungan terhadap komoditas, misalnya, dilakukan dengan tetap mengaitkannya dengan komoditas, seperti mendorong industri pengolahan agar memproses lebih lanjut komoditas. Pelaku usaha yang sebagian besar merupakan UMKM juga perlu waktu dalam bertransformasi. Industri nasional yang saat ini sebagian merupakan industri padat karya juga tidak bisa serta merta digantikan dengan industri padat modal, dengan mengesampingkan begitu saja keberadaan tenaga kerja.

REFERENSI

- Aaron, Meyer, F. Rivadeneyra, dan S. Sohal. "Fintech: Is this time different? A Framework for Assessing Risk and Opportunities for Central Banks," *Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-10*, Juli 2017.
- Amador, João; Cabral, Sónia; dan Maria, José R. "A Simple Cross-Country Index of Trade Specialization." *Open Economies Review*, Juli 2011.
- Davis, Jason. "Digital Transformation and Entrepreneurial Innovation." *Bahan Ajar SESPIBI Angkatan XXXIII*, September 2017.
- Juhro, Solikin M. "Penguatan Peran Bank Indonesia dan Optimalisasi Strategi Bauran Kebijakan untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan," *Paper SESPIBI Angkatan XXXI*, Juli 2013.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024*. Juni 2019.
- Kementerian Perindustrian. "Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035", Pusat Komunikasi Publik, Juni 2015.
- Kharroubi, Enisse. "Labor Market Flexibility and Growth". *mimeo*. Juli 2006.
- Mochtar, Firman. "Konfigurasi Kebijakan Makroekonomi Merespons Perubahan Struktural," *Paper SESPIBI Angkatan XXXIII*, November 2017.
- Nomura. "Escaping the Middle Income Trap", *Asia Special Report*, Agustus 2014.
- Pangestu, Mari E. *Indonesia Kreatif: Potential for Creative (Culture) Economy*, September 2019.
- Schwab, Klaus. "The Fourth Industrial Revolution: What It Means and How to Respond." *Foreign Affairs*, December 2015.
- Sheng, Andrew. "Digital Economy and Central Bank Policy: A Changing Context." *Bahan Ajar SESPIBI Angkatan XXXIII*, Agustus 2017.
- Waluyo, Dody B. "The Challenges of Promoting Strong Economic Growth and Macro Stability." *Bahan Ajar SESPIBI Angkatan XXXIII*, Agustus 2017.
- Warjiyo, Perry, dan Solikin M. Juhro. *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik*. Rajawali Press, 2017.
- Wignaraja, Ganeshan. "Can SMEs Participate in Global Production Networks? Evidence from ASEAN Firms." dalam Elms, Deborah K. dan Low, Patrick (Editor). *Global Value Chains in a Changing World*. 2013.
- Zulbainarni, Nimmi. *Root Cause Analysis Sektor Perikanan*. 2019.



IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

Gedung Kantor Pusat ISEI

Jl. Daksa IV No.9, Jakarta 12110

Telp. : (021) 720 8130

Fax. : (021) 720 1812

Email : isei.pusat@gmail.com

www.isei.or.id

